

**STRATEGI DIAM (*SILENCE STRATEGY*) INDIA  
DALAM MERESPONS SENGKETA PERBATASAN  
ANTARA CHINA DENGAN BHUTAN  
DI DATARAN TINGGI DOKLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S. Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Oleh:  
SUTRIYUWONO  
NIM. I72215036**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
JULI 2019**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sutriyuwono  
NIM : I72215036  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : **Strategi Diam (*Silence Strategy*) India  
dalam Merespons Sengketa Perbatasan antara  
China dengan Bhutan di Dataran Tinggi Doklam**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Juli 2019

Yang menyatakan



**Sutriyuwono**  
NIM: I72215036

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sutriyuwono  
NIM : I72215036  
Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **Strategi Diam (*Silence Strategy*) India dalam Merespons Sengketa Perbatasan antara China dengan Bhutan di Dataran Tinggi Doklam**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 10 Juli 2019  
Pembimbing



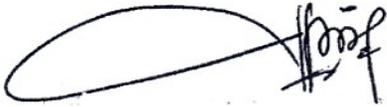
Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.IP., M.A  
NIP. 198408232015031002

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Sutriyuwono dengan judul: **“Strategi Diam (*Silence Strategy*) India dalam Merespon Sengketa Perbatasan antara China dengan Bhutan di Dataran Tinggi Doklam”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 25 Juli 2019.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.IP., M.A.  
NIP.198408232015031002

Penguji II



M. Fathoni Hakim, M.Si  
NIP. 198401052011011008

Penguji III



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA  
NUP. 201409001

Penguji IV



Rizki Rahmadini Nurika, S. Hub. Int., M.A.  
NIP. 199003252018012001

Surabaya, 9 Agustus 2019

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M. Phil, Ph.D.  
NIP.197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sutriuwono  
NIM : 172215036  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional  
E-mail address : yuwonosutri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Strategi diam (*Silence Strategy*) India dalam Merespons Sengketa Perbatasan antara China dengan

Bhutan di Dataran Tinggi Doklam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 September 2019

Penulis

(Sutriuwono)



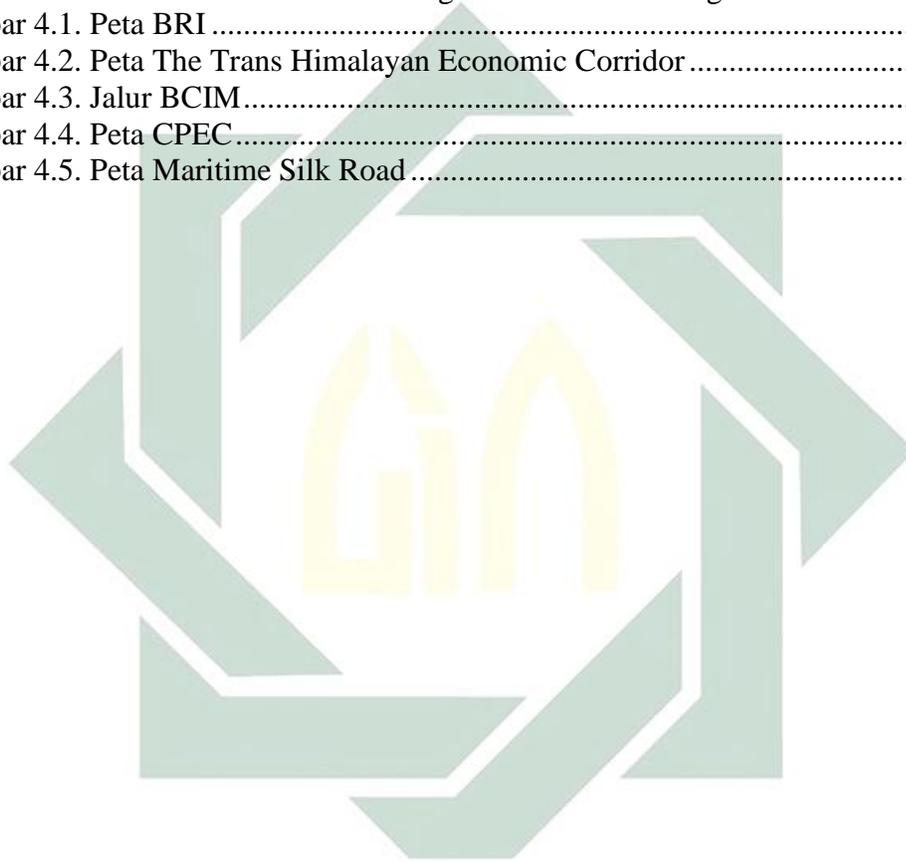


A. Telaah Lingkungan Internasional: Kompleksitas Permasalahan Perbatasan India-China dan Ancaman Potensial <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI).....	60
B. Personalitas Politik Pengambil Keputusan Politik Luar Negeri India ...	86
C. Kondisi Politik dalam Negeri India .....	97
D. Tinjauan Ekonomi dan Militer India.....	103
E. Interaksi antar Variabel-Variabel dalam Membentuk Strategi Diam India .....	115
BAB V: PENUTUP .....	118
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	130



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perbedaan Pendapat Mengenai Pertigaan Ketiga Negara .....	2
Gambar 1.2 Koridur Siliguri .....	6
Gambar 3.1 Determinan Politik Luar Negeri Berdasarkan Tingkat Analisis .....	51
Gambar 4.1. Peta BRI .....	71
Gambar 4.2. Peta The Trans Himalayan Economic Corridor .....	74
Gambar 4.3. Jalur BCIM.....	77
Gambar 4.4. Peta CPEC.....	80
Gambar 4.5. Peta Maritime Silk Road.....	84





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan jalan yang dilakukan oleh *People's Liberation Army (PLA)* pada tahun 16 Juni 2017 di Dataran Tinggi Doklam memicu terjadinya konflik antara China, Bhutan dan India. Dari perspektif Bhutan dan India, aktivitas yang dilakukan PLA—yang merupakan Pasukan Tentara China tersebut dianggap melanggar perjanjian batas yang telah disepakati antara Anglo-China pada konvensi tentang perbatasan Tibet pada Tahun 1890. Tetapi China bersikukuh bahwasanya mereka tidak melanggar teritorial Bhutan. Berikut isi kutipan isi konvensi mengenai Tibet dan Sikkim tahun 1890:

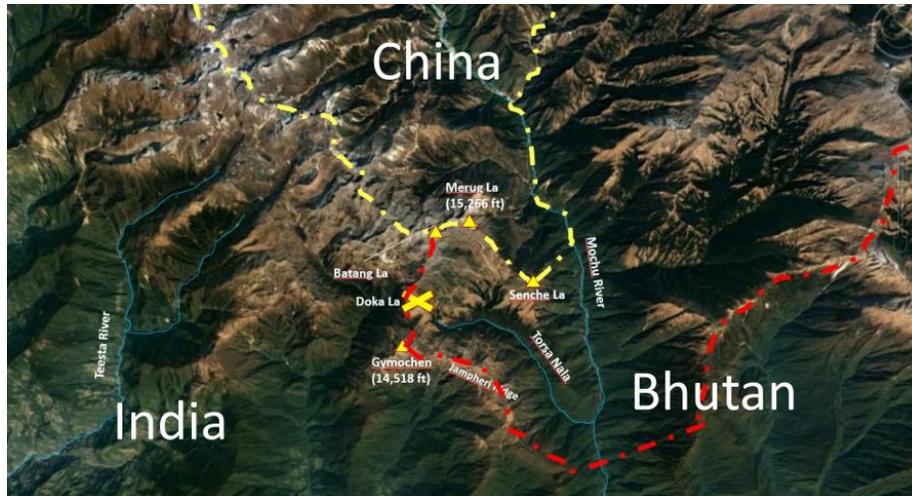
*“The boundary of Sikkim and Tibet shall be the crest of the mountain range separating the waters flowing into the Sikkim Teesta and its affluents from the waters flowing into the Tibetan Mochu and northwards into other Rivers of Tibet. The line commences at Mount Gipmochi on the Bhutan frontier, and follows the above-mentioned water-parting to the point where it meets Nepal territory”<sup>1</sup>*

Pakta tersebut kemudian menghasilkan berbagai interpretasi yang berbeda dari ketiga pihak (China, India dan Bhutan), seperti yang ditunjukkan pada peta:

---

<sup>1</sup>Konvensi antara China dengan Inggris, tanggal 18 Maret 1890 mengenai perbatasan Sikkim dan Tibet.

Gambar 1.1. Perbedaan Pendapat Mengenai Pertigaan Ketiga Negara



*Sumber:* Google earth/Anirudh Kanisetti.dalam

Garis merah adalah batas menurut China, sementara garis kuning adalah batas menurut India dan Bhutan. Pertigaan menurut India dan Bhutan ada di Batang La, Sementara menurut China, ada di Gympochen.

Mendengar pembangunan jalan yang dilakukan oleh PLA tersebut, *Indian Army* (Tentara India) yang berdalih “atas permintaan” Bhutan pun datang untuk mengawasi agar pembangunan jalan tidak melanggar kedaulatan Bhutan. Intervensi India itu bukan tanpa alasan, sebab Bhutan—sejak kemerdekaannya sangat bergantung terkait masalah keamanan teritorial, politik luar negeri hingga perekonomian terhadap India. Keberadaan India di perbatasan Bhutan sendiri diperdebatkan sebagai suatu wujud dari intervensi militer dan mengganggu kedaulatan Bhutan menurut China. Presensi Tentara India di Doklam juga turut

memicu terjadinya Insiden pertikaian dengan PLA.<sup>2</sup> Pertikaian India-China itu berakhir setelah situasi yang menegangkan terjadi selama 73 hari, yaitu sejak 16 Juni hingga 28 Agustus 2017. Hingga setahun lebih konflik itu berlalu, belum terdapat solusi demarkasi antara ketiga negara. Inilah yang kemudian dianggap sebagai salah satu tanda strategi diam yang merupakan suatu *blunder* bagi India sendiri. Strategi tersebut sangatlah dipertanyakan terkait relevansinya dengan kepentingan nasional India.<sup>3</sup>

Memang, India telah menurunkan pasukan untuk menjegal proyek pembangunan jalan yang dilakukan China, tapi tentu perlu pembicaraan diplomatik oleh India. Namun kenyataannya tidak demikian. Beberapa saat setelah konflik Meletus, Perdana Menteri India, Narendra Modi, malah diam tanpa ada pertemuan dan pembicaraan spesifik yang dijadwalkan antara kedua negara mengenai sengketa perbatasan di Doklam. Hal itu terlihat pada forum pertemuan antara kepala negara Brazil, Rusia, India China dan Afrika selatan (BRICS), di Shanghai dan Xiamen pada 1-2 Agustus dan 4 September 2017. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan menghasilkan sejumlah, beberapa di antaranya terjadi di bidang perdagangan dan kerja sama ekonomi.<sup>4</sup> Forum tersebut seharusnya

---

<sup>2</sup>Felix K Chang, "Conflict Escalation: China and India's Territorial Dispute in the Himalayas," *Foreign Policy Research Institute*, 13 November 2017, <https://www.fpri.org/2017/11/conflict-escalation-china-indias-territorial-dispute-himalayas/>.

<sup>3</sup>Prakash Menon, "Doklam-India's Silence is a Strategic Blunder," *Indian National Interest*, diakses pada 8 Oktober 2018, <https://nationalinterest.in/doklam-indias-silence-is-a-strategic-blunder-3c172516ae98>.

<sup>4</sup>"BRICS Leaders Xiamen Declaration," *BRICS 2017*, 8 September 2017, [https://www.brics2017.org/english/Documents/Summit/201709/t20170908\\_2021.html](https://www.brics2017.org/english/Documents/Summit/201709/t20170908_2021.html).

menjadi momentum bagi kedua negara untuk membicarakan perihal kebuntuan yang terjadi di Doklam. Diamnya Modi itu dipertanyakan oleh Rahul Gandhi, Pemimpin tertinggi *Indian National Congress*, partai politik yang saat ini menjadi oposisi di India.<sup>5</sup>

Sikap diam India itu juga dipandang keliru oleh penstudi keamanan, Lt. Gen. (Retd) Prakash Menon, yang merupakan mantan Penasehat Militer dan Sekretaris Pemerintah India (2011-2014) dan Pejabat *Special Duty in the National Security Council Secretariat* (NSCS) pada Maret 2015 hingga Maret 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai direktur di Strategic Studies Program di Takshashila Institution. Salah satu sebab kekeliruan itu adalah karena India dan Bhutan memiliki perjanjian akan merumuskan kebijakan luar negeri Bhutan atas pertimbangan New Delhi juga. Diamnya India adalah kesalahan Strategis, bertentangan dengan pasal 2 perjanjian hubungan bilateral dengan Bhutan yang ditandatangani pada tahun 2007:<sup>6</sup>

*“In keeping with the abiding ties of close friendship and cooperation between Bhutan and India, the Government of the Kingdom of Bhutan and the Government of the Republic of India shall cooperate closely with each other on issues relating to their national interests. Neither Government shall allow the use of its territory for activities harmful to the national security and interest of the other.”*<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>“Why is PM Modi silent over the China stand-off, questions Rahul Gandhi,” Hindustan Times, 8 Oktober 2018, <https://www.hindustantimes.com/india-news/why-is-pm-modi-silent-over-the-china-stand-off-questions-rahul-gandhi/story-yZ63luYFs75EAxrqwgHzN.html>.

<sup>6</sup>Prakash Menon, “Doklam-India’s Silence is a Strategic Blunder,” *Indian National Interest*, diakses pada 8 Oktober 2018, <https://nationalinterest.in/doklam-indias-silence-is-a-strategic-blunder-3c172516ae98>.

<sup>7</sup>*India-Bhutan Friendship Treaty 2007*, Pasal 2.

Isu Doklam sejatinya menjadi salah satu dari sejumlah panggung geopolitik antara India dan China, walau mungkin krisis ini tidak akan bereskalasi menjadi perang yang lebih besar. India dianggap memainkan diplomasi pasif, kebalikan dari diplomasi aktif yang diharapkan, seperti yang diungkapkan oleh SK Chand Basha dalam jurnalnya yang berjudul, “*Doklam crisis: Crux point for Geopolitical rivalry between India and China and posing threat to Eurasian stability*”. Konflik di pertigaan perbatasan ketiga negara itu pasti berimbas pada India, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang dialami bisa dari sektor keamanan, kedaulatan bahkan ekonomi bagi India.<sup>8</sup>

Jika negosiasi antara Bhutan dengan China berakhir dengan jatuhnya Doklam ke China, bukan tidak mungkin hal itu akan mengancam daerah India pada bagian Timur Lautnya. Wilayah yang dimaksud adalah jalur sempit yang disebut koridor Siliguri yang menghubungkan Delhi menuju Assam, Arunacha Pradesh dan negara-negara bagian lain. Koridor Siliguri terjepit antara Bangladesh, Bhutan, Nepal dan China. Akan sangat menguntungkan secara geopolitik jika China berhasil menembus atau setidaknya mendekati wilayah itu. Sebaliknya, hal itu akan menjadi malapetaka bagi India.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>SK Chand Basha, “Doklam crisis: Crux point for Geopolitical rivalry between India and China and posing threat to Eurasian stability,” *International Journal of Advanced Research and Development* 2, no. 5 (2017):474-477.

<sup>9</sup>Junu Bamasutary, “Negotiation over Chumbi Valley in Sino-Bhutan Relations: Strategic Implications for India” (tesis master, Sikkim University, 2016).

Gambar 1.2 Koridur Siliguri



Sumber: "Encroachers in The Himalayas," *Diplomatic Square*, 6 Juli 2017, <https://www.diplomaticsquare.com/encroachers-in-the-himalayas/>.

Di era pra-modern, batas-batas di Doklam ditentukan dengan batas air atau *watershed principle*. sementara yang menjadi dilema selama ini adalah: apakah batas mengikuti pakta tentang batas atau mengikuti batas air. Interpretasi batas dalam konvensi Anglo-China dari sudut pandang China menunjukkan bahwa Doklam milik mereka. Sementara dalam interpretasi India dan Bhutan, Doklam bukanlah milik China, melainkan milik Bhutan. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya China belum memiliki hak yang legal untuk membangun jalan karena belum ada kesepakatan resmi antara Bhutan dan China mengenai perbatasan. Tetapi kedua negara (Bhutan dan China) hingga saat ini sudah sebanyak 24 kali terlibat dalam negosiasi mengenai perbatasan sejak beberapa dekade silam.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Prakash Menon dan Anirudh Kaniseti. "The Doklam Imbroglio," *Takashila Discussion Document*, (12 September 2018): 6.

Eskalasi yang terjadi di Doklam merupakan sekian dari banyak wujud rivalitas India dengan China di Kawasan Asia Selatan. Rivalitas itu bisa kita lihat di Nepal salah satunya. Secara geografis, Nepal mirip dengan kondisi Bhutan: sama-sama terkunci di antara India dan China. Sebelum terpilihnya perdana Menteri Nepal pada tahun 2018 ini, pengaruh India masihlah dominan di Nepal. Namun semenjak terpilihnya Perdana Menteri Khadga Prasad Oli, yang merupakan pemimpin Partai Komunis Nepal (Marxisme-Leninisme), perlahan Nepal mulai mengurangi ketergantungannya terhadap India dan mulai membuka diri untuk kerja sama dengan China. Bukti dari hal tersebut adalah *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai kerja sama transit kapal di beberapa pelabuhan China, yang mengakhiri monopoli transit pelabuhan Nepal yang hanya melalui Kolkata, India.<sup>11</sup>

Penarikan tentara Nepal mengikuti latihan militer atas pimpinan India dalam kerangka *The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation* (BIMSTEC) dan lebih memilih latihan bersama China juga dipandang penulis sebagai indikasi untuk mengurangi pengaruh India dengan menyeimbangkan pengaruh China. Masifnya investasi China ke Nepal juga mempertegas persahabatan Nepal-China. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya rivalitas serupa akan tumbuh di Bhutan. meskipun Bhutan sangat bergantung pada India dan tidak mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan

---

<sup>11</sup>Gopal Sharma, "Nepal Says China to Allow Acces to Ports, Ending Indian monopoly on Transit," *UK Reuters*, 7 September 2018, <https://uk.reuters.com/article/uk-china-nepal-ports/nepal-says-china-to-allow-access-to-ports-ending-indian-monopoly-on-transit-idUKKCN1LN1JE>.



dalam merespons sengketa perbatasan antara China dengan Bhutan di Dataran Tinggi Doklam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai strategi diam (*silence strategy*) India dalam merespons sengketa perbatasan antara China dengan Bhutan di Dataran Tinggi Doklam.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari kajian ini adalah menambah referensi kajian Hubungan Internasional di Indonesia, terutama mengenai kajian tentang politik luar negeri India. Hal yang tidak kalah menarik adalah: penelitian ini sedikit banyak menyinggung tentang posisi Bhutan dalam percaturan politik di Asia Selatan, terutama dalam hubungannya antara China dengan India. Seperti yang kita ketahui, kajian mengenai Bhutan di universitas-universitas di Indonesia cukuplah minim. Padahal secara geografis negara Bhutan terletak di antara dua kekuatan besar Asia, yaitu antara India dan China. Selain itu ada banyak sisi menarik dari kajian Bhutan dari berbagai aspek.

#### **2. Manfaat Praktis**

Pemerintah Republik Indonesia akan mendapat banyak masukan dalam penelitian ini. Penelitian ini bermanfaat secara praktis: yaitu sebagai bahan kajian dan analisis politik luar negeri India di Kawasan Asia Selatan, terutama dalam menanggapi sengketa perbatasan di Doklam. Sehingga diharapkan

pemerintah Republik Indonesia akan lebih efektif dalam menerbitkan kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan Pemerintah India.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Prakash Menon dan Anirudh Kanisetti dalam “*The Doklam Imbroglio*”

Paper ini dipublikasikan oleh Takashila Institution (organisasi *think tank*), pada September 2018. Prakash Menon Merupakan Direktur *Strategic Studies Programme* di Takashila Institution. Sementara Anirudh Kanisetti merupakan analis di organisasi yang sama. Paper ini merupakan hasil diskusi mengenai kompleksitas konflik yang terjadi di Bhutan. Paper ini membahas implikasi sengketa terhadap kepentingan nasional secara umum, baik dalam segi hubungan China-India, India-Bhutan dan India-Bhutan.

Singkatnya ada tiga poin kunci dari paper ini. Pertama, retorika agresifitas China yang menjadi akhir dari banyak negosiasinya membuat banyak negara tetangga takut dan mulai memikirkan tentang serangan balik. Kedua, tetangga India secara khusus menyusun strategi untuk menyeimbangkan hubungan dengan China dan India. Ketiga, untuk melindungi kepentingan nasionalnya, India harus meningkatkan proyeksi kapabilitas militer dan ekonominya, atau kesiapan menghadapi China dalam berbagai isu kritis.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Prakash Menon dan Anirudh Kanisetti, “The Doklam Imbroglio,” *Takashila Discussion Document*, (12 September 2018) 27-28.



dipublikasikan pada 2017 ini membahas tentang krisis Doklam yang menjadi panggung geopolitik bagi India dan China serta imbasnya terhadap stabilitas di Eurasia. Paper ini juga menggali tentang kebijakan “*One China*” yang menyebabkan ekspansi unilateral aktif oleh China. Sengeket teritorial Laut China Selatan di Asia Tenggara dan konflik teritorial lainnya menjadi bukti maksimalisme unilateral China. Paper ini mengamati langkah geopolitik India dalam membalas rezim ekspansionis China, seperti kebijakan bea *anti-dumping* terhadap produk China. Basha juga membahas mengenai berbagai respons global terkait krisis di Doklam. Pada akhirnya, paper yang ditulis oleh SK Chand Basha ini merekomendasikan *Assertive Diplomacy* pada level regional bagi India untuk melawan kebijakan ekspansionis China, seperti kerjasama antara India dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).<sup>14</sup>

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Basha, skripsi ini secara spesifik menelaah tentang alasan India memilih strategi diam sebagai reaksi terhadap konflik Doklam dalam lebih dari setahun kasus tersebut berlalu. Selain itu, skripsi ini juga membahas tentang agresivitas China di kawasan Asia Selatan melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) dan juga di wilayah Samudra Hindia melalui *Maritime Silk Road* (MSR). Penulis skripsi juga menelaah

---

<sup>14</sup>SK Chand Basha, “Doklam crisis: Crux point for Geopolitical rivalry between India and China and posing threat to Eurasian stability,” *International Journal of Advanced Research and Development* 2, no. 5 (2017):474-477.

kompleksitas permasalahan perbatasan India-China, dan faktor-faktor seperti kepribadian pengambil keputusan India dan politik dalam negeri dan kondisi ekonomi militer India yang menjadi kausal dari strategi di India.

3. P. S. Suryanarayana dalam “*A High-Altitude Tussle: The Strategic of Bhutan, China and India*”

Penulis merupakan editor pada Institute of South Asian Studies (ISAS), National University of Singapore. Paper ini dipublikasikan pada 8 Agustus 2018. Peneliti mengkaji tentang Kemelut militer yang berkepanjangan antara India dan Cina yang memiliki implikasi strategis untuk masing-masing dari tiga negara yang bertetangga ini. China mengatakan bahwa India sebelumnya telah diberitahu tentang pembangunan jalan tersebut. India memandang statemen China tersebut berimplikasi secara serius terhadap keamanan India, terkhusus terkait penentuan pertigaan antara India, China dan Bhutan di Doklam.

Peneliti memandang bahwa China memperluas ruang strategisnya pada dataran Tinggi Himalaya dengan membangun jalan di Doklam. Bagi Beijing, Doklam adalah teritorinya jika ditinjau dari aspek sejarah. Hubungan antara Bhutan dengan India dipertaruhkan mengingat kontroversi apakah Bhutan benar-benar mengundang India secara eksplisit atau tidak. Insiden konflik perbatasan ini dianggap tidak ada hubungannya dengan pertigaan antara China,

India dan Bhutan menurut perspektif China.<sup>15</sup> India juga ingin melindungi bagian Timur Laut negaranya yang dekat dengan pertigaan itu. Secara keseluruhan, situasi yang sedang berlangsung kemungkinan akan membentuk bukan hanya keterlibatan China-India tetapi juga dari China dan Bhutan ke depannya.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis ini memiliki beberapa distingsi dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanarayana. Walaupun memiliki tema yang sama, yaitu tentang konflik di Doklam, penulis skripsi secara spesifik menganalisis mengenai sebab-musabab dari strategi diam India dalam merespons sengketa perbatasan China-Bhutan di Doklam. Ada empat determinan yang dikaji penulis. Pertama mengenai konteks lingkungan internasional. Kompleksitas sengketa perbatasan India-China dan ancaman potensial dari mega proyek BRI menjadi diyakini penulis berperan kuat pada strategi yang diambil India. Kedua, adanya peran personalitas politik Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India. Ketiga, Kedekatan *Bharatya Janata Party* dan *Communist Party of China*. Dan yang terakhir adalah kapasitas dan kapabilitas militer India yang masih kalah dibanding China, termasuk kekuatan nuklir dan infrastruktur perbatasan.

---

<sup>15</sup>Ministry of Foreign Affairs, PRC, “*The Facts and China’s Position Concerning the Indian Border Troops’ Crossing of the China-India Boundary in the Sikkim Sector into the Chinese Territory*,” 2 Agustus 2017, [http://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/P020170802542676636134.pdf](http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/P020170802542676636134.pdf).

<sup>16</sup>P S Suryanarayana, “A High-Altitude Tussle: The Strategic Stakes of Bhutan, China and India,” *Institute of South Asian Studies, National University of Singapore*, no. 44 (8 Agustus 2018).

4. Junu Bamasutry dalam “*Negotiations over Chumbi Valley in Sino-Bhutan Relations: Strategic Implications for India*”

Penelitian ini adalah Disertasi program studi Hubungan Internasional di Sikkim University, pada Tahun 2016. Disertasi ini bertujuan untuk memahami isu teritorial yang kompleks antara India, China dan Bhutan, khususnya dalam perspektif resolusi konflik. Peneliti menguji relevansi Lembah Chumbi bagi China, India dan Bhutan. Peneliti juga menggali implikasi negosiasi teritorial antara Bhutan dengan China terhadap India. Kerangka konseptual yang digunakan adalah konflik teritorial dan negosiasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan data-data empiris, baik dari data primer maupun sekunder. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal koran-koran dan lain sebagainya.

Berbeda dengan skripsi penulis yang bertujuan untuk menganalisis mengapa India memilih strategi diam dalam merespons sengketa perbatasan antara China-Bhutan. Selain itu, penulis menggunakan *foreign policy decision making process* perspektif William D. Coplin. Konsep-konsep yang digunakan juga berbeda dibandingkan yang dipakai Junu Bamasutry, yaitu konsep sengketa perbatasan, strategi diam, geopolitik dan geoekonomi. Kesamaan antara dua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data primer dan sekunder.

Pada akhirnya, Bamasutry menyimpulkan bahwa pada konteks saat ini, isu yang berkembang antara China dan Bhutan dapat berimplikasi pada India, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Seperti pada kasus Lembah Valley ini, aktornya sebenarnya adalah China dengan Bhutan. Tetapi isunya berdampak besar terhadap India dalam berbagai aspek, seperti keamanan, geografis dan ekonomi.<sup>17</sup>

5. Kumar Veer Dharendra dalam “*Geostrategic Consideration in Road-Builing in the Himalayan Borderland: A Comparative Study of India and China*”

Merupakan disertasi yang diajukan pada Political Geography Divison, Central for International Politics Organization and Disarmament, School of International Studies, Jawaharhal Nehru University, New Delhi, tahun 2011. Terdapat beberapa aspek yang menjadi diferensiasi antara penelitian yang dilakukan Dharendra dengan skripsi yang dibuat oleh penulis. Beberapa aspek tersebut di antaranya:

Pertama terkait pembahasan. Studi ini membahas tentang perbandingan pertimbangan geostrategis pembangunan jalan di wilayah pegunungan Himalaya antara India dan China. Sementara Skripsi ini membahas tentang strategi diam India dalam merespons sengketa perbatasan di Doklam 2017. Walau demikian, penulis juga memandang bahwa aspek perbandingan

---

<sup>17</sup>Junu Bamasutry. “Negotiation over Chumbi Valley in Sino-Bhutan Relations: Strategic Implications for India” (tesis master, Sikkim University, 2016).

pembangunan infrastruktur perbatasan sebagai salah satu penyebab diamnya India.

Kedua, dari segi konsep dan teori. Dhirendra menggunakan konsep dan teori geostrasegi, sementara skripsi ini mengoperasionalisasikan konsep strategi diam (*silence strategy*), sengketa perbatasan (*border dispute*), geopolitik dan geoekonomi, dan teori *foreign policy decision making process* menurut William D. Coplin.

Ketiga, ditinjau dari penggunaan metode penelitian, Dhirendra menggunakan metode penelitian data empiris dan metode perbandingan. Berbeda dengan metode yang digunakan pada skripsi ini, yaitu kualitatif dengan tipe eksplanatif. Kesamaan dari kedua karya tulis ini adalah penggunaan data primer dan sekunder.

Jalan-jalan China menuju aksai Chin di sektor Barat dan ke Tibet di Sektor Barat Daya membuat aliran barang-barang, pelayanan, dan peralatan militer China menjadi lebih mudah menuju ke area perbatasan. Singkatnya, China telah mampu meembangun sebuah jalan yang menambah kemampuannya untuk mengumpulkan pasukan sepanjang perbatasan. Progres kehadiran China ini telah berhasil jika dilihat dari sisi ekspansi China di wilayah yang sangat dekat dengan perbatasan darat India nan strategis. Mengingat pertimbangan geostrategis, India telah memperbaharui kepercayaannya dalam menghubungkan daerah pegunungan ini dengan

ketenangan negara dan telah membangun semua jalan di area strategis pada Ladakh di Jammu dan Kashmir, Rohtan di Himachal Pradesh dan Arunachal Pradesh di bagian Timur Laut.<sup>18</sup>

6. Bayu Kurniahadi Pranoto dalam “Analisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tiongkok-India di Wilayah Himalaya Pasca Perjanjian 2005 hingga Doklam Standoff 2017”

Penelitian ini adalah skripsi mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia (UII) yang diajukan pada tahun 2018. Kemelut sengketa perbatasan India-China sejak tahun 2005 hingga kebuntuan di Doklam tahun 2017 mendorong peneliti untuk mengkaji tentang mengapa selalu terjadi kegagalan dalam negosiasi perbatasan antara kedua negara. Peneliti menelaah permasalahan ini dengan menggunakan teori *Issue Linkage*, dengan metode penelitian kualitatif-deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder.<sup>19</sup> Peneliti menemukan bahwa kurang efektifnya perjanjian-perjanjian dan faktor-faktor lainnya menjadi penghambat bagi kedua negara dalam menemukan titik temu perselisihan. Peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan ekonomi

---

<sup>18</sup>Kumar Veer Dhirendra, “*Geostrategic Considerations in Road-Building in Himalayan Borderland: a Comparative Study of India and China*” (disertasi PhD, Political Geography Division, Central for International Politics Organization and Disarmament, School of International Studies, Jawaharhal Nehru University, 2011).

<sup>19</sup>Bayu Kurniahadi Pranoto, “Analisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tiongkok-India di Wilayah Himalaya Pasca Perjanjian 2005 hingga Doklam Standoff” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), 7-21.

atau perdagangan, hubungan bilateral dengan negara tetangga serta perbaikan organisasi regional.<sup>20</sup>

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Kurniahadi Pranoto, skripsi yang dibuat penulis secara spesifik mengkaji sikap diam India, terutama terkait krisis di Doklam 2017. Dari segi teori, penulis menggunakan teori proses pembuatan kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin. Untuk metode sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, namun penulis menggunakan tipe eksplanatif, sedangkan Bayu menggunakan tipe deskriptif. Kedua skripsi sama-sama menggunakan data primer dan sekunder.

## **F. Definisi Konseptual**

### **1. Strategi Diam (*Silence Strategy*)**

Penulis merangkum strategi diam yang dimaksud oleh Prakash Menon dan Anirudh Kaniseti secara garis besar ada pada dua aspek. Pertama, India tidak menyelesaikan permasalahan pokok sengketa tersebut dalam jangka setahun, bahkan sudah dua tahun kasus tersebut belum terselesaikan. Kemudian yang kedua adalah keheningan dalam lingkup nasional, yaitu keheningan media dan sepihnya agenda diskusi mengenai Doklam di parlemen India.<sup>21</sup>

Permasalahan pokok yang dimaksud adalah: 1) Bhutan tidak menandatangani perjanjian antara Inggris (yang saat itu menduduki India) dan

---

<sup>20</sup>Ibid., 90.

<sup>21</sup>Prakash Menon dan Anirudh Kaniseti, "The Doklam Imbroglio," *Takashila Discussion Document*, (12 September 2018): 26.

China (Tibet). 2) belum ada klarifikasi apakah penetapan batas menggunakan batas air atau pakta tentang perbatasan, dan 3) apapun landasan hukum yang dipakai, aktivitas China yang membangun jalan dan mengerahkan pasukannya tidaklah dapat dibenarkan. Belum terselesaikannya masalah-masalah tersebut dianggap Menon dan Kanisetti sebagai “diam”-nya India.<sup>22</sup>

Dalam lingkup nasional, strategi diam itu terlihat dari keheningan media yang sepi akan pemberitaan mengenai Doklam. Masalah Doklam telah menggaung ke seluruh dunia, jadi tak ada alasan bagi India dan Bhutan untuk tidak membawa sengketa ini ke dewan keamanan. Karena masalah tersebut tidak akan diselesaikan secara taktis, tetapi berdampak besar pada perpolitikan dunia. Menurut Prakash Menon, hanya kalkulasi dinamika politik dalam negerilah yang mendukung mereka untuk mengambil strategi diam.<sup>23</sup> Selain sepi pemberitaan Media Massa, keheningan juga dirasakan pada tingkat parlemen India. Parlemen mereka hanya terbatas pada diskusi mengenai tidak adanya perubahan *status quo* di Doklam, bukan mencari solusi permasalahan perbatasan ketiga negara.<sup>24</sup>

Peningkatan kerentanan Koridor Siliguri merupakan suatu keniscayaan yang menggambarkan kelemahan India yang belum mampu mengatasi

---

<sup>22</sup>Ibid., 7.

<sup>23</sup>Prakash Menon, “Doklam-India’s Silence is a Strategic Blunder,” *Indian National Interest*, diakses pada 6 April 2019, <https://nationalinterest.in/doklam-indias-silence-is-a-strategic-blunder-3c172516ae98>.

<sup>24</sup>Prakash Menon dan Anirudh Kanisetti, “The Doklam Imbroglio,” *Takashila Discussion Document*, (12 September 2018):26.

pendudukan dan klaim China di Doklam. Menurut Menon, kemenangan China telah tercatat baik dari segi politik maupun militer. Sementara strategi diam ditafsirkan Menon sebagai pengakuan India atas supremasi militer China. Hal ini dapat membawa dampak negatif terhadap interaksi militer India jika tentara China muncul kembali di perbatasan yang bukan hanya dari arah Doklam, tetapi di beberapa sudut perbatasan India yang tingkat kerentanannya tinggi. Keheningan India jelas-jelas membahayakan keamanan dan kepentingan nasionalnya sendiri.<sup>25</sup>

## 2. Sengketa Perbatasan (*Border Dispute*)

Manifestasi dari sengketa perbatasan sangatlah beragam. Tim Daniel, pengacara pada berbagai sengketa perbatasan di negara-negara Afrika mendefinisikan sengketa sebagai berikut:

*“Ordinarily, one would think that it is relatively easy to know whether or not a dispute exists. It is, however, a requirement under the rules both of the ITLOS and of the ICJ that a dispute must first exist before the parties can refer the subject-matter to the Court/Tribunal. It is not uncommon, in cases where a unilateral application is made, for the defending state to argue, by way of preliminary objection, that there is no dispute capable of adjudication by the Court/Tribunal.”*<sup>26</sup>

Sir Ian Brownlie menyatakan bahwa konsep sengketa perbatasan adalah sebagaimana yang tercermin dalam hukum internasional. Klaim atau protes

---

<sup>25</sup>Prakash Menon dan Anirudh Kanisetti, “The Doklam Imbroglio,” *Takashila Discussion Document*, (12 September 2018): 25.

<sup>26</sup>Gbenga Oduntan, *International Law and Boundary Disputes in Africa* (New York: Routledge 2015), 57.

menjadi manifestasi dari perselisihan dua negara atau lebih. Klaim atau protes itu harus disuarakan oleh pihak yang berwenang dan situasi yang sesuai seperti dalam pertemuan diplomatik, protes resmi yang disampaikan pada *International Court and Justice (ICJ)*, konferensi diplomatik, atau pada sesi pertemuan internasional. Klaim atau posisi yang dinyatakan harus ditentang oleh negara lain yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Sengketa perbatasan internasional adalah sengketa yang terjadi di wilayah perbatasan antarnegara. Hal itu bisa berlokasi di darat, laut maupun udara. Saat ini, perbatasan antarnegara rawan akan persengketaan internasional. Sengketa perbatasan darat mungkin terjadi akibat ketidaksetujuan dengan interpretasi dari pakta atau perjanjian (*treaty*) yang menjadi batas-batas antara dua negara atau lebih. Pelanggaran batas negara bisa terjadi baik secara sengaja maupun tidak. Kesengajaan pelanggaran oleh pasukan militer di batas darat akan menciptakan reaksi bahkan pertikaian dengan negara yang dilanggar teritorialnya. Sementara dalam perbatasan laut, negara yang berdekatan atau yang bertentangan mungkin tidak menyetujui perbatasan yang memisahkan wilayah maritim mereka masing-masing. Di udara, negara-negara banyak berdebat tentang ketidaksetujuan pelanggaran pesawat terbang yang melanggar teritorial mereka.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Ian Brownlie, *African Boundaries: A Legal and Diplomatic Encyclopaedia* (C. Hurst & Co., 1979), 13–14.

<sup>28</sup>Gbenga Oduntan, *International Law and Boundary Disputes in Africa* (New York: Routledge 2015), 63-69.

Sengketa teritorial dan sengketa perbatasan mempunyai definisi berbeda walau terkadang perbedaan antar keduanya terlihat kabur. Sengketa teritorial adalah menyangkut klaim suatu wilayah, sementara sengketa perbatasan adalah mengenai di mana garis batas yang tepat. Isu perbatasan muncul ketika dua entitas pemerintahan (negara) yang berbatasan atau lebih, bersengketa mengenai garis batas jika ditarik dari sisi antara domain mereka masing. Dalam kasus ini, biasanya dua negara (atau lebih) saling mengklaim wilayah mereka masing. Pertanyaan atas solusi sengketa perbatasan tersebut adalah bagaimana (hukum) yang memisahkan/ menjadi pembatas dua negara atau lebih. Sebagai contoh, pertigaan antara China, India dan Bhutan ditentukan berdasarkan konvensi Anglo-China. di sisi lain, sengketa teritorial tidak selalu menyertakan penarikan garis batas antara teritorial masing-masing entitas.<sup>29</sup>

### 3. Geopolitik

Geopolitik adalah studi tentang kekuatan pada masa lalu, sekarang dan masa depan. Geopolitik berbicara tentang kekuatan negara untuk mengendalikan ruang atau teritorial dan membuat kebijakan luar negeri dari sebuah negara dan yang berhubungan dengan politik internasional. Geopolitik juga merupakan studi tentang hubungan antara politik dan geografi, demografi, dan ekonomi, khususnya mengenai kebijakan luar negeri suatu negara. fokusnya adalah bagaimana faktor-faktor geografis, termasuk teritorial,

---

<sup>29</sup>Ibid., 63-69.

populasi, lokasi strategis, dan sumberdaya alam yang dimodifikasi oleh ekonomi dan teknologi, yang berdampak pada hubungan antar negara dan perjuangan untuk mendominasi dunia. Studi ini juga merupakan cabang dari geografi politik yang mempertimbangkan nilai-nilai strategis dari daratan dan laut dalam konteks kekuatan ekonomi dan militer serta ambisi sebuah negara. juga menjanjikan penjelasan hubungan antara realitas geografis dan hubungan internasional.<sup>30</sup>

Menurut Cowen dan Smith, “Geopolitik adalah lebih dari sebuah senjata dari politik luar negeri dan hubungan internasional; adalah sepaket dan bagian untuk membuat tatanan sosial nasional.”<sup>31</sup> Di zaman kuno, geopolitik pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Filsuf tersebut menemukan distingsi antara masing-masing sistem politik pada Negara Kota Yunani, negara tetangganya dan suku bangsa dari kondisi iklim. Sementara Immanuel Kant juga menganggap karakteristik orang-orang dari faktor iklim. Dalam ilmu sosial modern, pemikirin tentang geopolitik ini mendapatkan dorongan ketika geopolitik menjadi pendekatan utama dalam penelitian hubungan internasional. Friedrich Ratzel, Geographer Jerman mendefinisikan bahwa negara adalah “*Growing Organisms*”.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Materi Mata Kuliah Geopolitik dan Geostrategi, Jurusan Hubungan Internasional UIN Sunan Ampel Surabaya, semester 6, 2018.

<sup>31</sup>Priya Chacko, “The New Geo-Economics of a “Rising” India: State Transformation and The Recasting of Foreign Policy,” *Journal of Contemporary Asia* 45, no. 2 (2015):326-327.

<sup>32</sup>Soren Scholvin, “Geopolitic: An Overview of Concept and Empirical Examples from International Relations,” *Final Working Paper*, The Finnish Institute of International Affairs, April 2016.

#### 4. Geoekonomi

Edward Luttwak menggunakan istilah geoekonomi untuk menjelaskan tentang bagaimana sistem pasca-perang dingin. Panggung inti di antara negara-negara mungkin lebih condong ke ekonomi dibanding militer. Tiga tahun kemudian Luttwak menuangkan idenya itu dalam sebuah buku.<sup>33</sup> Dengan ancaman Uni Soviet terhadap Eropa dan Amerika Serikat yang kemudian menguap, dia tidak membayangkan bahwasanya akan ada konfrontasi militer beberapa masa ke depan, senada dengan hasil observasi Samuel Huntington, yaitu kekuatan ekonomi akan penting sebagai ukuran peeningkatan dalam penentuan keunggulan suatu negara. Luttwak berpendapat bahwa aliran modal global, data, barang-barang dan orang menembus negara berdaulat tidak berarti bahwa negara mengganti karakter teritorial.<sup>34</sup>

#### G. Argumentasi Utama

Berdasarkan kajian terdahulu dan konsep-konsep yang digunakan, penulis berargumentasi bahwa strategi diam yang dilakukan India adalah langkah diambil karena lemahnya kapasitas militer India dibanding China. Kemudian dalam konteks regional kawasan, pengaruh China telah semakin kuat dan itu membuat India dilema keamanan sehingga negara tersebut memilih strategi diam.

---

<sup>33</sup>Edward Luttwak N, *From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce*, (National Interest: 1990).

<sup>34</sup>Soren Scholvin dan Mikael Wigell Surveying, *Geo-economics as Concept and Practice in International Relations: The State of The Art, Working Paper*, no. 102, April 2018.

## H. Sistematika Pembahasan

### 1. Bab I

Adalah pendahuluan yang merupakan pintu masuk penelitian. Bagian ini berisi tentang: a) latar belakang masalah; b) rumusan masalah; c) tujuan penelitian; d) manfaat penelitian; e) tinjauan pustaka; f) definisi konseptual; g) argumentasi utama; dan h) sistematika pembahasan.

### 2. Bab II

Membahas mengenai teori yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis studi kasus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *foreign policy decision making process theory* menurut Willam D. Coplin. Pendekatan induktif digunakan dalam penelitian ini, dalam artian peneliti menjadikan teori sebagai pedoman dalam penelitian, tetapi tidak terlalu berpatokan pada teori. Hal itu dilakukan untuk menghindari subjektivitas peneliti yang berimbas pada intervensi data. Data disajikan secara apa adanya tanpa terganggu pada kaidah-kaidah teori. Penulis menggunakan model teoriasi induktif, dengan *model blank theory and data focus*.<sup>35</sup>

### 3. Bab III

Adalah pembahasan mengenai metode yang ditempuh penulis dalam melakukan penelitian. Bagian ini meliputi: a) pendekatan dan jenis penelitian, b) tahap-tahap penelitian, c) lokasi dan waktu penelitian, d) tingkat

---

<sup>35</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 25.



























dari krisis, bukannya dampak umum, maka peristiwa dipandang dan diinterpretasi secara berbeda pula. Misalkan, departemen perdagangan Amerika Serikat lebih memperhatikan akibat krisis tersebut terhadap perdagangan dunia. Kemudian influencers yang berkecimpung di perminyakan memperhatikan dampak krisis tersebut terhadap produksi dan distribusi minyak di Timur Tengah.

Di sisi lain, *partisan influencers* lebih memiliki citra yang luas tentang politik luar negeri dibandingkan dua *influencers* sebelumnya. Pandangan mereka, partisan influencers di negara dengan system terbuka, tentang politik luar negeri beragam. Di sistem politik terbuka, partai politik yang berada di pihak pemerintah secara otomatis memiliki kekuatan dalam membuat kebijakan, dan mencari pembenaran atas kebijakan itu. Sementara partai yang berada di luar kekuasaan berusaha untuk mendiskreditkannya. Apabila disiplin partai lemah, pandangan tentang dunia internasional ditentukan oleh *partisan influencers*, bukan oleh keanggotaan partai.

Berbeda dengan di negara terbuka, pandangan partisan influencers tentang hubungan internasional kurang beragam, namun mereka juga menganut paham yang luas tentang lingkungan internasional, seperti pada sistem terbuka. Kelemahan di sistem negara tertutup ini adalah mereka tidak dapat menyuarakan pandangan yang berbeda dari pandangan resmi pemerintah.



Dahl dan kawan-kawan. Konsep ini juga digunakan oleh Rosenau dalam menelaah politik luar negeri.<sup>58</sup> Coplin memfokuskan bidang isu ini pada empat kategori, diantaranya keamanan nasional, kepentingan ekonomi, bidang isu khusus yang berkaitan dengan kepentingan ideologis dan historis, dan masalah-masalah prosedural—bagaimana mengupayakan tujuan politik luar negeri.

Dalam sistem pemerintahan terbuka, untuk bidang ekonomi, sering muncul konflik terhadap kebijakan-kebijakan antara *policy influencers*. *Bureaucratic* dan *mass influencers* merupakan pendukung nasionalistis kebijakan ekonomi luar negeri, yaitu kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat. Sementara *partisan influencers* lebih sering berorientasi partikularistik walau kadang juga nasionalistis. Pun dengan *interest influencers*, cenderung berorientasi partikularistik. *Bureaucratic* dan *mass influencers* sayangnya tidak memiliki posisi dan wawasan yang cukup untuk menyuarakan kepentingan nasional berskala Panjang. Sementara partisan dan *interest influencers* aktif menyuarakan kebijakan-kebijakan yang bersifat partikularis, yang berarti keuntungan ekonomi bagi mereka sendiri. Akibat dilema seperti ini, pengambil keputusan berkemungkinan mengambil kebijakan yang bersifat proteksionis.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>James N. Rosenau, "Foreign Policy an an Issue-Area", dalam James N. Rosenau, ed., *Domestic Sources of Foreign Policy* (New York: Free Press, 1967), 11-51.

<sup>59</sup>William D. Coplin, *Introduction to International Politics: a Theoretical Overview*, diterjemahkan oleh Marsedes Marbun (Bandung: Penerbis Sinar Baru Algesindo, 2003), 95-100.



























## 2. Keteralihan (*Transferability*)

Legitimasi hasil penelitian juga didapat dari aspek keteralihannya. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti perlu memberikan uraian rinci, jelas sistematis, dan dapat dipercaya. Setelah itu pembaca dapat memberikan penilaian kepada penelitian yang telah kita lakukan: apakah layak atau tidak untuk diterapkan atau diaplikasikan di tempat yang berbeda.

## 3. Kebergantungan (*Dependability*)

Pemeriksaan terhadap seluruh proses penelitian merupakan cara yang ditempuh dalam uji kebergantungan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa peneliti tidak melakukan penelitian, namun bisa memberikan data. Jika seperti itu, penelitian yang dilakukan peneliti berarti tidak *dependable*. Dari sinilah pentingnya melakukan konsultasi skripsi kepada dosen pembimbing, yaitu untuk menguji, menghindari dan mengantisipasi hal-hal tersebut. Selain itu, penulis juga diharuskan menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data, serta keterangan mengenai proses pengolahan data.

## 4. Kepastian (*Confirmability*)

Cara yang dipakai untuk menguji kepastian sama persis dengan menguji kebergantungan. Oleh karena itu, pengujian akan kepastian dan kebergantungan bisa dilakukan secara bersamaan. Kekhawatirannya pun sama: jangan sampai ada hasil penelitian tanpa melalui proses. Untuk memastikan hal itu, dosen pembimbing melakukan audit yang cermat terhadap seluruh komponen proses penelitian hingga hasil penelitiannya.







## BAB IV

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB STRATEGI DIAM INDIA DALAM PERSPEKTIF *FOREIGN POLICY DECISION MAKING* *PROCESS THEORY* WILLIAM D. COPLIN

#### A. Telaah Lingkungan Internasional: Kompleksitas Permasalahan Perbatasan India-China dan Ancaman Potensial *Belt and Road Initiative* (BRI)

Seperti yang telah dijelaskan dalam analisis politik luar negeri menurut William D. Coplin, aspek-aspek penting dalam konteks internasional adalah geografi, politik dan ekonomi. Ditinjau dari ketiga aspek tersebut, ditambah lagi dengan aspek geoekonomi dan geopolitik, penulis menemukan bahwa ada dua faktor yang berimplikasi terhadap diamnya India. Pertama, Sejarah panjang permasalahan dan konflik perbatasan antara China dengan India di sepanjang pegunungan Himalaya yang hingga sekarang belum menemukan titik temu penyelesaian konflik. Kedua, Megraproyek ekonomi China, yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) atau *One Belt One Road* (OBOR) yang melibatkan tetangga India di kawasan Asia Selatan. Dimana China dianggap menjadi ancaman potensial yang mengganggu hubungan India dengan negara satelit di Asia Selatan. India cukup dibuat kerepotan dengan dua hal tersebut.

##### 1. Konflik Perbatasan India-China

Di perbatasan sepanjang pegunungan Himalaya, tepatnya batas dengan China, India menghadapi masalah berupa demarkasi yang belum ditentukan dan hanya mengikuti *status quo* berupa perjanjian zaman penjajahan Inggris. Secara garis besar, ada tiga sektor perbatasan kedua negara yang telah

berlangsung sejak beberapa dekade lalu: sektor Barat, Tengah dan sektor timur. Di sektor barat, perbatasan wilayah sengketa yang terbentang seluas 38,000 Km<sup>2</sup> di area barat berlokasi di Provinsi Tibet dan Xinjiang dari sisi China, dan Ladakh di India. Aksai Chin yang berada di wilayah Jammu dan Kashmir (J dan K) yang diklaim oleh China setelah perang Sino-India 1962. Sementara India juga mengklaim wilayah Aksai Chin dan Lembah Shakgsam (Wilayah yang diserahkan Pakistan ke China). China juga menentang pendudukan India di Leh, atau di Selatan Aksai.<sup>74</sup>

Di tahun 1865, Kolonial Inggris menetapkan *Johnson Line* yang menunjukkan bahwa Aksai China merupakan bagian dari J dan K (milik India). Namun China meletakkan batas di Karakoram Pass (bagian dari Aksai Chin). Untuk menyelesaikan kebuntuan di perbatasan tersebut, munculah *Macartney-Mc Donald line* (yang diusulkan oleh Inggris) dan *Principles of Panchsheel* yang tetap tidak membuat isu perbatasan terselesaikan. China tidak melegitimasi kedua dalil perbatasan tersebut dengan membangun jalan sektor perbatasan Barat yang menghubungkan Xinjiang dan Tibet yang melintasi Aksai Chin. Bahkan orang China menyerang patroli India di perbatasan. Kejadian itu menjadi salah satu penyebab konfrontasi China-India tahun 1962. Hingga saat ini, China dianggap menduduki seluas 38,000 Km<sup>2</sup> wilayah India. India juga menganggap Pakistan mengambil wilayah India dan diserahkan ke China

---

<sup>74</sup>“India-China Border Disputes-What is the Doklam Issue?,” *Clearias*, 9 Juli 2019, <https://www.clearias.com/india-china-border-disputes/>.

seluas 5,180 Km<sup>2</sup> di Shaksgam yang hingga saat ini disebut *Pakistan Occupied Kashmir* (PoK) pada Perjanjian perbatasan Sino-Pakistan tahun 1963.<sup>75</sup>

Sementara untuk sektor tengah, terbentang 545 Km sepanjang Himachal dan Uttar Pradesh. China mengklaim wilayah itu seluas 2000 Km<sup>2</sup> yang tersebar pada delapan titik kecil. Hingga saat ini, China masih dengan tegas mengklaim wilayah tersebut. Bahkan di tahun 2015, tentara China mengusir penggembala India dari padang rumput karena mendekati Batas Barohati. Untuk Sektor tengah, Sikkim merupakan titik persengketaan yang saat ini telah menjadi wilayah administratif India.<sup>76</sup>

Sengketa di sektor timur bermula dari perang Anglo-Burma tahun 1824-1826 yang mendorong aneksasi terhadap Assam yang selanjutnya melakukan ekspansi ke Myanmar (dulu Burma). Usaha Inggris menentukan perbatasan dengan memberlakukan “*inner line permit*” untuk mencegah perampokan di kebun teh. Untuk mengatasi isu perbatasan tersebut, dilaksanakanlah konferensi antara India, China dan Tibet. Hasilnya berupa garis batas sepanjang 900 km, dimulai dari Bhutan di barat melewati “*great bend*” Sungai Brahmaputra di Timur. Sekretaris luar negeri Inggris di India, McMahon

---

<sup>75</sup>V. K. Shrivastava, *Sino-Indian Boundary Dispute and Indo-Centric Reflections on China's Military Capabilities, Thoughts and Options in the Near Future* (New Delhi: Vivekananda International Foundation, 2016), 15-16, <https://www.vifindia.org/sites/default/files/Sino-Indian%20Boundary%20Dispute%20and%20Indo-Centric%20Reflections.pdf>.

<sup>76</sup>India-China Border Disputes-What is the Doklam Issue?,” *Clearias*, 9 Juli 2019, <https://www.clearias.com/india-china-border-disputes/>.

mengusulkan perbatasan dalam prinsip “batas air” yang kemudian batas tersebut dikenal dengan sebutan “*McMahon Line*”.<sup>77</sup> Di sektor Timur ini, China mengklaim wilayahnya seluas 90,000 km<sup>2</sup> di wilayah sepanjang perbatasan Arunachal Pradesh di wilayah yang disebut *North East Frontier Agency* (NEFA) tersebut. Daerah tersebut pernah diduduki PLA saat perang 1962.<sup>78</sup>

Tensi tinggi setelah perang 1962 masih terasa hingga normalisasi yang dilakukan tahun 1976, namun konflik masih terus berlangsung hingga konfrontasi di perbatasan dianggap suatu hal yang ‘lumrah’ di tahun 2000-an. Temuan Stephen Westcott dengan menggunakan teori realis neoklasik menunjukkan bahwa ketika dua negara dengan kekuatan besar (seperti China dan India) menghadapi sengketa perbatasan, mereka biasanya sulit untuk menyelesaikannya, entah itu melalui perjanjian atau eskalasi konflik, dan oleh karena itu mereka kembali kepada kebijakan *status quo*. Sejak mereka memilih *status quo*, keadaan semakin memburuk.<sup>79</sup>

*Status quo* yang digunakan oleh China dan India pada saat ini sama dengan yang digunakan tahun 1963, yaitu *McMahon Line*. Pertemuan di Wuhan

---

<sup>77</sup>V. K. Shrivastava, *Sino-Indian Boundary Dispute and Indo-Centric Reflections on China's Military Capabilities, Thoughts and Options in the Near Future* (New Delhi: Vivekananda International Foundation, 2016), 16-17, <https://www.vifindia.org/sites/default/files/Sino-Indian%20Boundary%20Dispute%20and%20Indo-Centric%20Reflections.pdf>.

<sup>78</sup>India-China Border Disputes-What is the Doklam Issue?,” *Clearias*, 9 Juli 2019, <https://www.clearias.com/india-china-border-disputes/>.

<sup>79</sup>Stephen Westcott, “The Intractable Sino-Indian Border Dispute: A Theoretical and Historical Account” (tesis master, Murdoch University, 2017), 279. <https://pdfs.semanticscholar.org/227f/416f0db428f9bf6378beacf9d237b3a8f435.pdf>.



sejak beberapa dekade silam. Pembahasan yang lebih detail mengenai infrastruktur perbatasan ini akan dibahas pada sub bab ekonomi dan militer India.

## 2. Ancaman Potensial BRI

Untuk merealisasikan geoekonomi multilateral ini, Beijing melibatkan puluhan negara, termasuk tetangga India di Asia Selatan seperti Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Afganistan dan Maladewa. Hanya Bhutanlah—*bufferzone* sekaligus sahabat India di *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) yang hingga saat ini belum menandatangani BRI. Bukan tak mungkin jika beberapa waktu ke depan Bhutan akan membuka diri dan menjalin hubungan diplomatik dengan China. Niatan China untuk membangun hubungan bilateral yang baik dengan Bhutan juga terlihat. Negosiasi mandiri Bhutan (tanpa campur tangan India) terkait konflik Doklam patut diwaspadai India, mengingat China telah menawarkan bantuan finansial kepada Bhutan senilai US\$ 10 Juta—dimana jika hal itu terwujud akan menjadi alat diplomasi atau bahkan propaganda yang jitu bagi China terhadap Bhutan.<sup>82</sup> Kemudian pada Oktober 2018, China kembali menawarkan bantuan dana

---

<sup>82</sup>Abin Johnson, “China woos Bhutan \$ 10 Billion Aid Offer,” Defpost, 25 Agustus 2017, <https://defpost.com/china-woos-bhutan-10-billion-aid-offer/>.

kepada Bhutan ketika pertemuan kedua negara dilakukan, walaupun bantuan tersebut juga ditolak Bhutan.<sup>83</sup>

Selain itu, warga China juga memiliki ketertarikan terhadap Bhutan. Tercatat pada 2017, kunjungan wisata warga China ke Bhutan mencapai 6,421 orang, yang merupakan kunjungan tertinggi dari dekade sebelumnya. Jumlah tersebut cukup tinggi mengingat Bhutan membatasi jumlah wisatawan mancanegara yang masuk untuk tetap menjaga kelestarian alamnya.<sup>84</sup>

Penulis memandang bahwa sikap diam India dalam merespons sengketa perbatasan, jika dipandang dari konteks internasional, selain karena faktor perbatasan, juga disebabkan oleh agresivitas China dalam merebut pengaruh negara-negara tetangga India di Asia Selatan, yang hingga saat ini telah menjalin kerjasama yang erat dengan dengan China, baik secara bilateral maupun unilateral. Keberhasilan China tersebut menjadi suatu ancaman bagi eksistensi India di kawasan, karena tetangganya beraliansi dengan China. Sebagai contoh, hubungan China-Sri Lanka dan China-Maladewa yang dipererat dengan pinjaman dana. Hubungan China-Nepal yang semakin erat pasca terpilihnya Sharma Oli sebagai perdana Menteri yang memiliki kedekatan ideologis, yaitu komunis. Pun dengan Afganistan dan Bangladesh

---

<sup>83</sup>“China Woos Bhutan, Exspense Rival of India,” *South China Morning Post*, 17 Oktober 2018, <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2168951/china-woos-bhutan-expense-rival-india>.

<sup>84</sup>“China Moves to Woo Bhutan, to India’s Displeasure,” *Japantimes*, 17 Oktober 2018, <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/10/17/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/china-moves-woo-bhutan-indias-displeasure/#.XUjftI4zBIU>.

memiliki hubungan bilateral yang baik dengan China. Hingga yang mungkin paling mengerikan bagi India adalah hubungan China-Pakistan yang memiliki hubungan hamonis, berbanding terbalik dengan hubungan India-Pakistan yang terus mengalami pasang surut. Kerjasama China-Pakistan terjadi di banyak sektor, seperti ekonomi dan pertahanan-keamanan. Kabarnya China juga membantu pengembangan senjata nuklir Pakistan. Seluruh mitra China di Asia Selatan tersebut juga menandatangani proyek *One Belt One Road* (OBOR) atau disebut juga dengan *Belt and Road Initiative* (BRI).

Kebijakan perdagangan dan bantuan yang digelontorkan Beijing menjadi sarana untuk menekan negara-negara agar mendukung China. sebagai contoh: hukuman China terhadap Korea Selatan karena memasang *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) buatan Amerika Serikat yang dianggap membahayakan keamanan China. Hukuman yang dilakukan China berupa boikot pariwisata yang menyebabkan anjloknya kunjungan turis China ke Korea Selatan sejak bulan Maret 2017. Boikot informal China juga berdampak pada pembatasan impor dan blokade akses penangkapan ikan.<sup>85</sup> Kemudian hukuman China terhadap impor ikan salmon dari Norwegia, tak lama setelah Oslo memberikan Nobel Perdamaian kepada sosok yang dianggap

---

<sup>85</sup>Ralph Jennings, "Why It Hurts Less Now As China Punishes South Korea With Tourism Cuts," *Forbes*, 2 Maret 2018, <https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2018/03/04/china-keeps-punishing-south-korea-with-tourism-cuts-for-now/#12ccf177366c>.



memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat. Kemudian dengan negara kawasan dalam kerangka “*Neighbourhood First Policy*” (termasuk hubungan baik dengan China sebagai negara yang bertetangga langsung dengan India). Hubungan baik dengan Asia Barat dalam “*Go West*”, serta hubungan dengan Asia Tenggara dalam kerangka “*Act East Policy*”. India juga meningkatkan intensitas kerjasama dengan Australia dan Jepang melalui latihan militer, baik melalui latihan darat maupun laut. Hal itu juga dapat diartikan sebagai “*Balance of Power*”, untuk menyeimbangkan kekuatan China di Kawasan.<sup>89</sup>

Rivalitas India dan China bukanlah sesuatu yang baru. Dua kekuatan besar Asia tersebut telah sejak lama terjebak dalam persaingan berbagai bidang. Tepatnya setelah pecahnya perang Sino-India tahun 1962, hubungan kedua negara terus dilanda pasang surut, seperti konflik perbatasan yang berkali-kali terjadi dan perebutan pengaruh, baik segi ekonomi maupun politik. Walau eskalasinya tidak sebesar perang yang terjadi pada 1962, tetapi perang itu berubah ke perebutan pengaruh di Kawasan, terkhusus di Kawasan Asia Selatan. Walaupun begitu, India dan China juga terlibat aktif dalam beberapa forum kerjasama atau organisasi internasional yang sama, seperti pada *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), kelompok negara *emerging*

---

<sup>89</sup>Dalbir Ahlawat dan Lindsay Hughes, “India-China Stand-off in Doklam: Aligning Realism with National Characteristics,” *The Round Table: Journal: The Commonwealth Journal of International Affairs*, (10 Oktober 2018): 7.

*economy* Brazil, Russia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS) dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), G-20, dan lain sebagainya.

Kemunculan inisiatif BRI merupakan suatu hal yang semakin memperkeruh pertarungan hegemoni antara China dengan India di level kawasan Asia Selatan. Implementasi BRI terjadi di lintas daratan maupun di jalur laut, yaitu *Maritime Silk Road* (MSR) yang kesemuanya melintasi India. India tidak mendatangi forum BRI atau *Belt and Road Forum* (BRF) yang diadakan oleh China pada Mei 2017, atau 2 bulan sebelum konflik perbatasan di Doklam terjadi. Hal itu disinyalir sebagai bentuk penolakan terhadap mega proyek yang diinisiasi dan dipimpin langsung oleh China tersebut.

Penulis memandang baik secara langsung maupun tak langsung, inisiatif China itu bergesekan dengan proyek politik luar negeri India, yaitu “*Neighbourhood First*” dan “*Act East*”. Lebih khusus dalam studi kasus ini, inisiatif tersebut menyebabkan diamnya India. Permasalahan sengketa perbatasan yang belum tuntas di kawasan Himalaya, ditambah lagi dengan ancaman kehilangan sahabat di Asia Selatan membuat India semakin was-was.

Secara geopolitik, India “dikurung” dalam empat sub BRI China, yaitu *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC), *Bangladesh–China–India–Myanmar Forum for Regional Cooperation* (BCIM), *Trans-Himalayan Economic Corridor* (THEC) dan *Maritime Silk Road* (MSR). Keenganan India untuk bergabung bersama proyek BRI di tahun 2017 menjadi suatu bukti



menyingkirkan pengaruh Amerika Serikat, Jepang bahkan India yang selama ini juga memegang pengaruh besar di Asia, bahkan merupakan aktor kunci di Asia Selatan.<sup>92</sup>

Rezim Narendra Modi menekankan tiga fokus politik luar negeri, di antaranya: stabilitas keamanan nasional: akselerasi fase kedua dari reformasi ekonomi neoliberal, dan mengatasi nasionalisme kultural yang berorientasi *inward-looking* dan etnosentris.<sup>93</sup> Hegemoni China di Kawasan sedikit banyak menjadi batu sandungan bagi India untuk mengimplementasikan ketiga kebijakan itu, terutama untuk poin pertama dan kedua. India perlu memperbaiki keamanan perbatasan untuk mencegah akses masuk teroris dari Pakistan dan Afganistan. Reformasi ekonomi membutuhkan kerjasama dalam bidang teknologi serta investasi dari negara-negara kuat seperti AS, Jepang, China, negara-negara Uni Eropa.<sup>94</sup>

Dalam 180 hari pertama masa kepemimpinannya, Modi telah berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin dan melakukan lawatan ke berbagai negara, di antaranya China, Rusia, Pakistan, Amerika Serikat dan Jepang, sebagai negara-negara dengan kekuatan besar dan berpengaruh di Kawasan. Serta ke negara tetangga sebagai implementasi dari kebijakan "*neighborhood*

---

<sup>92</sup>Darshana M. Baruah, "India's Answer to the Belt and Road: A Road Map for South Asia," *Carnegie India: Working Paper* (Agustus 2018): 7-11.

<sup>93</sup>Nasionalisme kultural ini bisa dipahami sebagai kebangkitan kembali atau hiper-realisme.

<sup>94</sup>Rajan Kumar, "India's Foreign Policy under Modi Government," *Marmara Universitesi Siyasi Bilimler Dergisi* 2, no. 2 (2014): 101-117.

*first*". Interaksi itu dapat berupa forum-forum seperti BRICS, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dua puluh negara dengan ekonomi terbesar dunia (G-20), pertemuan dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), SAARC dan lain sebagainya.

Ancaman dari BRI kian terlihat. Walau India tidak menyetujui proyek besar BRI, namun sejumlah satelit India seperti Pakistan, Afganistan, Nepal, Myanmar, Bangladesh dan Srilanka turut bekerjasama dalam kerangka BRI. Hanya Bhutanlah "tembok terakhir" yang setia terhadap India, yang belum berpartisipasi pada BRI. Kebuntuan di Doklam mengawali terjadinya negosiasi antara Bhutan dengan China. China sempat menawarkan bantuan dana kepada Bhutan, namun ditolak oleh Bhutan yang merupakan *Bufferzone* India. Untuk memahami ancaman dari BRI terhadap India, penulis memetakan satu-persatu koridor BRI yang tersebar baik di lintas darat maupun laut.

a. Koridor Ekonomi Trans-Himalaya

Kemenangan Khadga Prasad Sharma Oli dari Partai Komunis pada tahun 2015 membawa haluan baru politik luar negeri Nepal, salah satunya terkait hubungan dengan China dan India. Kecenderungan Nepal yang dulu dekat dengan India dan bergantung baik secara ekonomi dan militer dengan India, sekarang mulai mengurangi ketergantungan itu dengan beralih ke China. *Protocol on Transit and Transport* yang ditandatangani kedua negara pada tahun 2018 silam menjadi bukti dari berakhirnya monopoli

pelabuhan Kolkata untuk akses ekspor-impor Nepal dari dan menuju negara ketiga. Hal itu merupakan solusi bagi blokade ekonomi yang dilakukan oleh India terhadap Nepal tahun 2015. Blokade yang dilakukan India disebabkan oleh diskriminasi terhadap etnis minoritas di Nepal. Bak pucuk dicinta ulam pun tiba, China pun membuka akses transit dari empat pelabuhan untuk Nepal. Selain itu, Nepal juga melakukan latihan militer dengan China, padahal Nepal juga mengikuti latihan militer bersama India dalam kerangka BIMSTEC.<sup>95</sup>

Gambar 4.2. Peta The Trans Himalayan Economic Corridor



<sup>95</sup>Mahendra Subedi, "Nepal, Cina Come Closer With Protocols on Transit and Transport," *CGTN*, 10 April 2019, <https://news.cgtn.com/news/3d3d674d79677a4d34457a6333566d54/index.html>.

Sumber:Kathmandu Post,diakses pada 3 April 2019,  
<http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-06-26/new-trans-himalayan-dictum.html>.

*The Trans-Himalayan Economic Corridor* atau Koridor ekonomi trans-Himalaya merupakan “Jalur Sutra bagian Selatan” juga merupakan usulan dari Raja Nepal, Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, pada KTT *South-South* di Doha pada tahun 2005. Konsep trilateral antara India, China dan Nepal yang telah diusulkan 2010 sepertinya tak akan terealisasi. Pun begitu dengan Koridor ekonomi yang diusulkan China dengan melibatkan Nepal dan India. Koridor itu kemungkinan hanya akan menjadi ajang kerjasama antara China dengan Nepal. China menyadari akan tantangan membangun koridor ini, sebab Himalaya juga dimiliki India. India kemungkinan tak akan setuju sebelum ada kejelasan mengenai batas-batas negara di Himalaya. Karena hingga saat ini, seperti pada pembahasan bagian awal, China dan India masih menggunakan perjanjian Anglo-China sebagai status quo yang megasilkan interpretasi yang berbeda antar kedua pihak.

Kebijakan India dan China terhadap Himalaya sungguh berbeda. India tetap menjaga agar Himalaya tetap minim akses, sedangkan China agresif membangun konektivitas di Kawasan tersebut. Aktivitas itu tentu mengganggu India sebagai “*Superpower*” di Kawasan Asia Selatan. Minimnya akses di pegunungan Himalaya sebenarnya cukup merugikan India jika sewaktu-waktu mendapat serangan tentara China di perbatasan.

China yang didukung oleh infrastruktur yang maju di perbatasan akan lebih leluasa jika *vis-à-vis* dengan India. Pemahaman mengenai perbandingan infrastruktur perbatasan akan dibahas selanjutnya pada sub-bab ekonomi dan militer yang secara singkatnya menunjukkan ketertinggalan jauh India akan pembangunan infratrstruktur perbatasan yang dilakukan China.<sup>96</sup>

Sebagai *counter-balancing* terhadap geopolitik China di Himalaya, India tak tinggal diam. Mereka turut membangun Inisiatif untuk membuat jalur kereta api di Himalaya. Namun program yang digagas India pembangunannya lambat. Kereta Ekspres-Himalaya menghubungkan dengan Leh—wilayahnya di bagian utara yang terletak di Jammu dan Kashmir ke Arunachal Pradesh di bagian timur negaranya. Pembuatan jalur pintasan menuju Bhutan dan Nepal mengundang keuntungan komersial bagi India, termasuk jika berkolaborasi dengan China. Namun untuk bekerjasama dengan China di area tersebut, jika dipandang dari sudut keamanan, merupakan sebuah dilema bagi India.<sup>97</sup>

b. Koridor Ekonomi Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM)

BCIM merupakan suatu jalur perdagangan yang menghubungkan Kunming (China) menuju Mandalay (Myanmar), kemudian Dhaka

---

<sup>96</sup>“King Gyanendra Address at the Second South-south Summit”, *South Asia Terrorism Portal*, diakses 3 April 2019, [https://www.satp.org/satporgtp/countries/nepal/document/papers/king\\_June05.htm](https://www.satp.org/satporgtp/countries/nepal/document/papers/king_June05.htm).

<sup>97</sup>Darshana M. Baruah, “India’s Answer to the Belt and Road: A Road Map for South Asia,” *Carnegie India: Working Paper*, (Agustus 2018): 19-21.

(Bangladesh) dan Kolkata (India) sebagai destinasi akhir dari jalur tersebut. BCIM ini berkemungkinan akan diteruskan ke jalur sutra maritim melalui Pelabuhan Kolkata, India. Cikal bakal jalur ini sudah didiskusikan sejak era 90-an. Kemudian terbentuklah perjanjian antara Perdana Menteri China, Wen Jiabo dengan Manmohan Singh selaku Perdana Menteri India. BCIM ini lebih “damai” ketimbang koridor ekonomi China-Pakistan yang akan dibahas pada subbab selanjutnya. Sebab mendorong keharmonisan hubungan antara China dengan India. Walau begitu, proyek tersebut belumlah terealisasi.

Gambar 4.3. Jalur BCIM



Sumber: Orpita Oysharja "BCIM: In the Shadow of Belt and Road Initiative," *Financial Express*, 3 April 2019,

<http://www.today.thefinancialexpress.com.bd/print/bcim-in-the-shadow-of-belt-and-road-initiative-1511942258/>

India terlihat ragu dalam menjalankan proyek besar ini, terutama jika dipandang dari aspek keamanan. Keraguan terjadi salah satunya karena

serangan China di Arunachal Pradesh dan sikap China yang kontra terhadap *Act East Policy* yang merupakan salah satu kebijakan politik luar negeri India. Keraguan itu diperparah dengan peristiwa Doklam 2017 yang telah semakin mereduksi kepercayaan India dan membuat mereka waspada akan ancaman keamanan dari China. apalagi jalur BCIM ini akan menjadi pendukung MSR melalui pelabuhan Kolkata menuju pelabuhan-pelabuhan lain di Samudra Hindia. Kekhawatiran pemerintah India telah dibuktikan dengan sebuah forum yang dinamakan *Joint Study Group (JSG)* yang dibentuk keempat negara BCIM untuk membuat evaluasi dan kajian mendalam.<sup>98</sup>

Hingga saat ini, impian jalur perdagangan dari China ke Kolkota tersebut belum terbentuk. Selain itu, China yang merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan BCIM menunjukkan kepentingan geostrategi dan ekonomi untuk memperoleh akses yang leluasa di Kawasan teluk Bengal yang strategis bagi India. Kemudian kebijakan India "*Act Asia Policy*" (ASP) terganggu dan curiga dengan keterlibatan aktif Provinsi Yunnan di Barat daya China dalam mempromosikan BCIM.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Patricia Uberoi dalam Mohd Aminul Karim and Faria Islam, "Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) Economic Corridor," *The Korean Journal of Defense Analysis* 30, no. 2 (Juni 2018): 284.

<sup>99</sup>Darshana M. Baruah, "India's Answer to the Belt and Road: A Road Map for South Asia," *Carnegie India: Working Paper*, (Agustus 2018): 19-20.

Intinya keterlibatan China mengundang kekhawatiran India. Negara Bagian Timur Laut India adalah yang terancam akan keamanannya, seperti pemberontakan etnis telah sering terjadi di negara bagian timur laut beberapa dekade ini. Ketakutan India itu serta merta menghambat progress proyek BCIM sendiri. Tujuan BCIM meningkatkan konektivitas di empat area, yaitu: perdagangan, infrastruktur, modal, investasi dan masyarakat. India khawatir BCIM hanya akan menumbuhsururkan China untuk mendominasi pasar Asia. Kompleksitas geopolitik antara India dengan Pakistan juga menjadi salah satu penolakan India terhadap proposal untuk menghubungkan BCIM dengan CPEC melalui *Pakistan/Indian occupied Kashmir*.<sup>100</sup>

c. Koridor Ekonomi China-Pakistan

Pakistan telah menyerahkan operasional Pelabuhan Gwadar kepada perusahaan yang berasal dari China dengan masa kontrak selama 40 tahun, yang artinya China memiliki akses yang luas terhadap pelabuhan, termasuk menjadikan Gwadar sebagai basis militer. China menggunakan tentaranya untuk membangun rute untuk menghubungkan ke Nepal dalam proyek CPEC.<sup>101</sup>

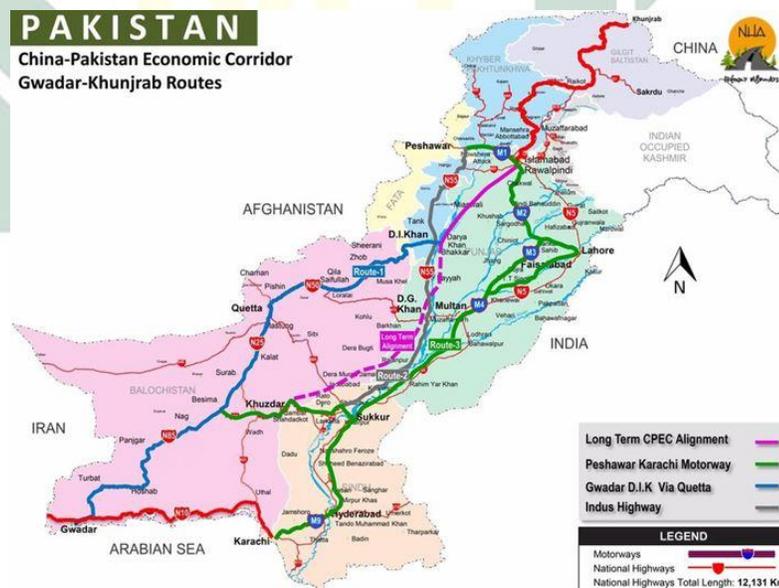
---

<sup>100</sup>Ibid., 19-20.

<sup>101</sup>“Gwadar Port Leased to Chinese Company for 40 Years, Minister tells Senate,” *Pakistan Today*, 20 April 2017, <https://www.pakistantoday.com.pk/2017/04/20/gwadar-port-leased-to-chinese-company-for-40-years-minister-tells-senate/>.

Pinjaman kepada Pakistan sebesar \$57 Juta dapat membuat Pakistan terbebani. Pendudukan Kashmir oleh Pakistan pun bisa menjadi wilayah kolonial China yang mengancam langsung kedaulatan India. Karena hingga saat ini Kashmir menjadi perebutan antara India dengan Pakistan.<sup>102</sup> Pembuatan pelabuhan Gwadar oleh China memicu India untuk mengambil langkah strategis, yaitu dengan menurunkan kekuatan angkatan laut yang lebih banyak. Seperti yang kita ketahui, India juga mengimbangi langkah China, yaitu juga membangun proyek di *Sea Line of Communication* (SLOC).<sup>103</sup>

Gambar 4.4. Peta CPEC



<sup>102</sup>Narender Kumar, "Belt and Road Initiative: A Potential Threat to the Region and Eurasia," *Centre for Land Warfare Studies: Issue Brief*, No. 150 (Agustus 2018): 8-9.

<sup>103</sup>Maula Hudaya dkk, "The Rise of Naval Power as an Response of Chinese and Pakistani CPEC (China Pakistan Economic Corridor)," Universitas Airlangga (5 April 2018).

Sumber: Muhammad Ijal Khan, "Positive Impacts of CPEC on Pakistan's Economy," *Voice of Balochistan*, diakses 1 Juli 2019, <https://voiceofbalochistan.pk/opinions-and-articles/cpec/positive-impacts-cpec-pakistans-economy/#prettyPhoto>.

CPEC juga melintasi Jammu dan Kashmir, yaitu wilayah yang sama-sama diklaim oleh Pakistan dan India. Sejak merdekanya Pakistan dari India pada tahun 1947, India masih mengklaim daerah itu. Sejak Pakistan terbentuk, kedua negara telah terlibat perang sebanyak empat kali. Terbaru, hubungan India dan Pakistan bergejolak di Kashmir, pergolakan itu membuat kedua negara terancam terlibat dalam eskalasi perang yang lebih besar. Saat ini Pakistan diuntungkan dengan masuknya China ke Pakistan melalui kerjasama CPEC. Eskalasi konflik bisa terjadi antara China dengan India, yaitu jika di Balochistan yang merupakan tempat operasi kelompok separatis yang didukung oleh India, terjadi konflik yang memakan korban orang-orang China.

China tidak sejalan dengan Pakistan yang menginginkan penyelesaian konflik Kashmir melalui bantuan internasional. China Bersama Amerika Serikat dan Uni Eropa serta pihak-pihak lain menginginkan penyelesaian konflik melalui pembicaraan bilateral antara Pakistan dengan India. CPEC bisa semakin memperkuat hubungan antara Pakistan dengan China, karena presensi tentara China yang mengawal perbatasan. di sisi lain, itu bisa memperburuk konflik perbatasan dengan India, termasuk hubungan India-Pakistan. Dan bisa memperburuk

hubungan dengan tetangga lain seperti Afganistan. Tapi jika masyarakat Kashmir ingin bergabung dengan India, CPEC akan percuma bagi Pakistan dan China.<sup>104</sup>

Dalam pengembangan proyek CPEC, China menurunkan militernya untuk menjaga pekerja dan teknisi. Di lain sisi, akademisi China berpendapat bahwa China ingin India bergabung dengan CPEC. Kehadiran China di antara kedua negara bertujuan mendorong stabilitas keamanan antara India dan Pakistan. Namun, studi lain mengungkapkan bahwa klausul kerjasama koridor ekonomi itu juga disertai dengan pembuatan kapal selam Pakistan oleh China sebagai triad nuklir kedua. Pada tahun 2011, Pakistan telah meminta China untuk membangun pangkalan angkatan laut di Gwadar.<sup>105</sup>

Pakistan yang tak pernah harmonis dengan India dan kedekatan hubungan Pakistan dengan China adalah suatu ancaman yang nyata bagi India sendiri. Kedua tetangga (Pakistan dan China) sekaligus “rival” India tersebut juga mempunyai kapasitas dan kapabilitas militer yang kuat, bahkan militer China melebihi kekuatan India. Suatu bahaya besar jika India harus *vis-à-vis* dengan China dan Pakistan.<sup>106</sup> India berseberangan

---

<sup>104</sup>Christian Wagner, “The Effect of the China-Pakistan Economic Corridor on India Pakistan Relations,” *German Institute for International and Security Affairs:SWP Comments*, no. 25 (April 2016): 1-4.

<sup>105</sup>Namrata Goswani, “The China Pakistan Economic Corridor, China, and Pakistan: More than just the Economy,” *Scholar Warrior*, (Spring 2017): 39-40.

<sup>106</sup>Baqir Sajjad Syed, ‘China to Build Four Submarines in Karachi’, *Dawn*, 7 Oktober 2015, <http://www.dawn.com/news/1211363>.

dengan CPEC, karena alasan *Pakistan/Indian occupied Kashmir* dan Gilgit-Baltistan. CPEC juga ini terlihat sebagai upaya untuk transfer kapal selam dari China ke Pakistan, peningkatan angkatan laut, latihan gabungan antara China dengan Pakistan, yang akan membawa prospek baik bagi China tentang kehadiran mereka di Samudra Hindia. Hal ini, secara otomatis membuat India semakin mudah diserang.<sup>107</sup>

d. Eksistensi Jalur Sutra Maritim di Samudra Hindia

*Maritime Silk Road* adalah bagian dari BRI jalur laut yang juga eksis di Samudra Hindia. Beijing memiliki beberapa proyek infrastruktur di kawasan tersebut, diantaranya: Pelabuhan Kyaukpyu di Myanmar, Hambantota di Sri Lanka dan Gwadar Pakistan. Perusahaan China dan Myanmar telah menyepakati kerjasama pembangunan pelabuhan senilai \$7,3 juta dan kawasan industri di kawasan ekonomi khusus (KEK). Kota yang berada di Negara Rakhine tersebut juga menjadi pangkal pemasangan pipa saluran minyak dan gas bumi sebesar \$1,5 juta menuju Kunming, Provinsi Yunnan di China.

Kerja sama ini menjadi alternatif bagi China untuk menghindari jalur Selat Malaka dan mendorong pembangunan Provinsi Yunnan yang ada di bagian Barat Daya China. Kerjasama tersebut mendorong Myanmar

---

<sup>107</sup>Namrata Goswani, "The China Pakistan Economic Corridor, China, and Pakistan: More than just the Economy," *Scholar Warrior*, (Spring 2017): 43.

untuk meminjam dana dari China yang berkisar 5 persen dari GDP Myanmar.<sup>108</sup> Untuk di Hambantota, Sri Lanka memberi China akses kontrol kepemilikan sahan dan 99 tahun kontrak Pelabuhan sejak Desember 2017. Atas dalih pengisian bahan bakar bisa menjadi alasan persinggahan angkatan laut China.<sup>109</sup> Pembangunan Pelabuhan Gwadar menjadi bagian dari CPEC yang semakin memperkuat hubungan China dan Pakistan.<sup>110</sup>

Gambar 4.5. Peta Maritime Silk Road



Sumber: Sue Nichols, “China New Silk Road Offers Environmental Promise,” *Research @MSU*, diakses pada 7 Agustus 2019, <https://research.msu.edu/yesterdays-silk-road-tomorrows-environmental-superhighway/>.

<sup>108</sup>Gregory B Poling, “Kyaukpyu: Connecting China to the Indian Ocean,” dalam “China’s Maritime Silk Road: Strategic and Economic Implications for the Indo-Pacific Region”, *CSIS Brief*, Maret 2018.

<sup>109</sup>Jonathan Hillman, “Game of Loans: How China Bought Hambantota,” *China’s Maritime Silk Road: Strategic and Economic Implications for the Indo-Pacific Region*, *CSIS Brief*, Maret 2018.

<sup>110</sup>Gurmeet Kanwal, “Pakistan’s Gwadar Port: A New Naval Base in China’s String of Pearls in the Indo-Pacific,” *China’s Maritime Silk Road: Strategic and Economic Implications for the Indo-Pacific Region*, *CSIS Brief*, Maret 2018.

Kurang detailnya informasi tentang Jalur Sutra Maritim atau *Maritime Silk Road* (MSR) membuat India merasakan keraguan. Selain *Act East* yang berfokus pada hubungan dengan negara-negara anggota ASEAN, India juga melakukan strategi *Go West*, yaitu koridor ekonomi antara India, Iran dan Afganistan. Selain itu India juga terlibat dalam koridor transportasi antara Bangladesh, Bhutan, India dan Nepal (BBIN) untuk efisiensi logistik di Asia Selatan.<sup>111</sup>

MSR yang diinisiasi pada tahun 2013 bertujuan untuk memperkuat hubungan antara China dengan negara-negara di Asia Tenggara. Interaksi antara Beijing dengan Delhi di Samudra Hindia cukup terbatas, tidak seperti di daratan. Kehadiran basis militer China di Samudra Hindia mengundang ketakutan bagi India sendiri. Angkatan laut China sering melintasi Samudra Hindia, bahkan kapal selam China telah bersandar di pelabuhan milik Sri Lanka dan Pakistan. China memainkan diplomasi militernya untuk melakukan pendekatan dengan negara-negara kepulauan. Pangkalan militer luar negeri pertama China di Djibouti tahun 2017 telah meningkatkan kewaspadaan India.<sup>112</sup> Dalam implementasi jalur sutra sektor laut ini, China

---

<sup>111</sup>Amitendu Palit, "The Maritime Silk Road Initiative (MSRI): Why India is Worried, What China Can Do," *Global Policy*, 31 Mei 2017, <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/31/05/2017/maritime-silk-road-initiative-msri-why-india-worried-what-china-can-do>.

<sup>112</sup>Charlotte Gao, "China Officially Sets Up Its First Overseas Base in Djibouti," *The Diplomat*, 12 Juli 2017, <http://thediplomat.com/2017/07/china-officially-sets-up-its-first-overseas-base-in-djibouti/>.

juga memimjamkan pendanaan kepada negara-negara kecil yang disinyalir banyak pihak sebagai “*debt trap*”.

Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat India untuk melakukan pembangunan insfrastruktur yang bisa menunjang kekuatan sektor laut. India menggunakan pendanaan dari Jepang sebagai alternatif untuk menghindari China yang merupakan salah satu kreditor terbesar di dunia. Selain itu India juga melakukan kerjasama dengan Australia, Jepang Prancis dan Amerika Serikat sebagai langkah strategis untuk keamanan. India juga membangun kerjasama dan konektivitas dengan negara-negara sekitaran Samudra Hindia seperti Sri Lanka, Maldives, dan Seychelles. Selain itu, India juga termasuk inisiator dari *Indian Ocean Rim Association* (IORA) Bersama 19 negara anggota, tanpa terdapat China.<sup>113</sup>

## **B. Personalitas Politik Pengambil Keputusan Politik Luar Negeri India**

Pada pembahasan ini, penulis akan menelaah bagaimana faktor personalitas individu *decision maker* bekerja dalam proses penentuan kebijakan luar negeri. Seperti yang ditekankan pada teori, masing-masing variabel penentu kebijakan secara parsial mempengaruhi output berupa keputusan. Dalam penentuan kebijakan luar negeri, ada asumsi yang berbunyi bahwa penyusunan politik luar negeri adalah tugas intelektual yang tidak tunduk pada faktor-faktor psikologis dan organisasional. Tetapi asumsi itu sedikit sekali yang sesuai dengan kenyataan.

---

<sup>113</sup>Darshana M. Baruah, “India’s Answer to the Belt and Road: A Road Map for South Asia,” *Carnegie India: Working Paper*, (Agustus 2018): 22-25.

Pengambil keputusan luar negeri atau *decision maker* sejatinya adalah manusia yang hidup dalam kerangka faktor-faktor psikologis tertentu serta pengaruh organisasional, lebih spesifiknya organisasi yang berupa birokrasi yang terkait kebijakan luar negeri, yaitu kementerian luar negeri. Dalam ilmu psikologi, ada suatu konsep yang disebut psikobiografi, yaitu kepribadian individu yang ditelusuri dari kisah-kisah kehidupannya. Sementara dalam Coplin disebut variabel idiosinkratik, yang menggali faktor-faktor pembentuk kepribadian pengambil keputusan.<sup>114</sup>

Perdana Menteri India dengan nama lengkap Narendra Damordadas Modi itu lahir di Vadnagar, 17 September 1950. Di awal tahun 70-an, Pria yang akrab disapa Modi tersebut bergabung dengan organisasi pro-Hindu, *Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad*, yang merupakan organisasi sayap pelajar *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS). RSS sendiri memiliki kedekatan dengan *Bharatiya Janata Party* (BJP), partai Modi yang berkuasa di India untuk periode 2014-2019 dan 2019-2024. RSS adalah organisasi paramiliter yang disinyalir sebagai mentor yang juga membidani lahirnya BJP. Antara kedua organisasi tersebut memiliki kesamaan, yaitu sayap kiri dan Hindu Nasionalis.

Dalam wawancara dengan *Reuters*, Modi mengungkapkan bahwa ia seorang Hindu yang nasionalis dan patriotik:

*“I’m nationalist. I’m patriotic. Nothing is wrong. I’m a born Hindu. Nothing is wrong. So, I’m a Hindu nationalist so yes, you can say I’m a*

---

<sup>114</sup>Martha L Cottam, dkk, *Pengantar Psikologi Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 9-10.



(*Jagat Guru*). Selain itu, Spiritualitas Modi juga terpengaruh oleh Vadnagar, yaitu tempat untuk menimba ilmu tentang spiritualitas Budha yang telah sejak berabad-abad silam. Namun Cita-citanya untuk menjadi tentara kandas karena keluarganya tak memiliki biaya untuk menyekolahkan Modi di Sainik School, sekolah di bawah kementerian pertahanan India. Di usia 17-an tahun, Modi melakukan perjalanan spiritualnya dengan pergi ke pemandian Himalaya dan ke pertapaan untuk menemukan jawaban tentang apa yang akan ia lakukan dalam hidupnya.<sup>117</sup>

Modi pun mulai mewujudkan asanya untuk mengabdikan pada negara, dengan mulai bergabung dengan BJP, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian mulai meniti karir kepemimpinannya di Gujarat: yang diyakini penulis sebagai implementasi semangat mengabdikan dan mengentaskan kemiskinan. Lebih jauh lagi, penulis melihat semangat mengabdikan itu berimplikasi pada kedekatan dengan China, yaitu dorongan Modi untuk melakukan kerja sama ekonomi dan bisnis dengan China untuk memakmurkan rakyat Gujarat, seperti yang akan dijelaskan pada poin ketiga berikut ini.

## 2. Kedekatan Modi dengan China Sejak Memimpin Gujarat

Sejak bergabungnya dengan BJP pada 1987, peran Modi dalam melambungkan nama BJP cukup signifikan. Modi turut mencetak sejarah pertama kalinya BJP menduduki kursi legislatif India di tahun 1995 sekaligus

---

<sup>117</sup>“From Vadnagar to Gandhinagar and Beyond: Humble Beginning: The Early Years,” *Narendra Modi*, 24 Mei 2014, <https://www.narendramodi.in/humble-beginnings-the-early-years-3131>.

penunjukan dirinya sebagai Sekretaris Nasional BJP. Setelah di tahun 1990 Modi menjadi bagian dari koalisi pemerintah melalui BJP.<sup>118</sup> Karir politiknya kian menanjak ketika beliau menggantikan Keshubhai Patel Sebagai Kepala Menteri (*Chief Minister*) pasca bencana gempa yang menewaskan lebih dari 20,000 jiwa di Gujarat. Di tahun 2002, BJP kembali memenangkan pemilu yang mengantarkan Modi kembali menduduki kursi Gujarat. Kemenangan yang diraih di Gujarat cukup signifikan, yaitu sebanyak 127 kursi dari total 182 kursi di mejelis legislatif. Kemenangan besar kembali diraih berturut-turut pada periode 2007 dan 2012 yang masing-masing memperoleh 117 dan 115 yang mengantarkan Modi kembali menduduki posisi ketua menteri di Gujarat.

Era Modi di Gujarat banyak menuai pro dan kontra. Beberapa di antaranya ialah kerusuhan 2001 dan pertumbuhan ekonomi yang dianggap signifikan. Kepemimpinannya dipertanyakan ketika terjadi kerusuhan yang memakan lebih dari 1,000 orang yang kebanyakan berasal dari Muslim. Konflik tersebut dipicu oleh pembakaran kereta di Godha yang menelan puluhan Umat Hindu sebagai korban yang mengundang amukan terhadap Umat Islam di Gujarat. Kecaman dari dunia pun mengalir kepada Modi. Kasus tersebut menyerat rekan-rekan Modi menerima hukuman berat. Namun Modi selalu lolos dari investigasi dan pengadilan.<sup>119</sup> Seorang psikolog sosial terkemuka,

---

<sup>118</sup>Shanthie Mariet D'Souza, "Narendra Modi: Prime Minister of India," *Encyclopedia Britannica*, update terakhir 17 Juni 2019, <https://www.britannica.com/biography/Narendra-Modi>.

<sup>119</sup>Ibid.

Ashis Nandy Menilai modi sebagai kasus klinis klasik dari kepribadian yang otoriter dengan campuran kekuatan puritan, penyempitan kehidupan emosional dan fantasi kekerasan. Hal itu dinilai dari sejumlah kekerasan yang terjadi ketika beliau memimpin Gujarat hingga menjadi perdana Menteri India.<sup>120</sup>

Modi diklaim berhasil melakukan pembangunan ekonomi di Gujarat oleh sejumlah Media. Namun sebuah analisis dari *London School of Economics and Political Science* menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Gujarat pada era Modi dibanding dengan era 1980-an di India. Dengan menggunakan berbagai pendekatan, tidak ada pertumbuhan signifikan atau diferensiasi akselerasi era Modi dibanding erang 80-an dan 90-an, namun pertumbuhannya cukup menarik perhatian.<sup>121</sup>

Faktor-faktor pembentuk kepribadian seperti inteligensia, kebutuhan akan prestasi, pengalaman individu dan lain-lain— turut mempengaruhi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan. Penulis meyakini bahwa pengalaman Narendra Modi di Gujarat juga membentuk persepsinya tentang relasi dengan China. Saat menjadi orang nomor satu di Gujarat, Modi memiliki kedekatan dengan China dengan paradiplomasi yang dimainkannya. Kedekatan itu tercermin dari eratnya kerjasama yang dilakukan. Tercatat Modi melakukan

---

<sup>120</sup>Pankaj Misha, "Narendra Modi: the Divise Manipulator Who Charmed the World," *The Guardian*, 9 November 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/09/narendra-modi-the-divisive-manipulator-who-charmed-the-world>.

<sup>121</sup>Maitreesh Ghatak dan Sanchari Roy, "Did Gujarat's Growth Rate Acceleate Under Modi?" *Economic and Political Weekly*, 49, no. 15 (12 April 2014): 15.

kunjungan ke China sebanyak empat kali selama menjadi Kepala Menteri, frekuensi yang banyak untuk ukuran seorang pemimpin di negara bagian. Hal itu menandakan kedekatan Modi dengan China telah berlangsung sejak lama. Modi membawa delegasi bisnis Gujarat ke India sebanyak 20 orang. Kemudian sekitar 80 perusahaan telah andil dalam bisnis dan investasi di negara Gujarat. Nampaknya semangat *neighbourhood first* memang telah muncul dalam kepribadian Modi yang menginginkan hubungan yang harmonis dengan tetangga India, bahkan sebelum ia terpilih menjadi perdana menteri India.

Narendra Modi sejatinya mengagumi etos kerja orang China dan ingin memperkuat hubungan dengan China. Hal itu terungkap dalam kunjungan keempatnya ke China sebagai Kepala Menteri, Modi mengungkapkan bahwa:

“China dan rakyatnya memiliki tempat khusus di hati saya. Saya mengagumi sifat kerja keras, disiplin, dan ulet mereka, dan di atas semua itu, kesadaran akan sejarah mereka. Budaya kami sangat kuat dan mengakar. Selama bertahun-tahun, hubungan kami semakin diperkuat. Kami berkomitmen untuk membuat hubungan itu lebih baik, berbuah dan produktif.”

Modi melihat minat perusahaan-perusahaan China untuk bekerja di Gujarat dan berusaha menyambut dengan sepenuh hati. Modi juga berencana membuka sekolah Bahasa Mandarin di Gujarat ketika itu, walau hingga saat ini belum terlihat realisasinya.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup>“Narendra Modi Seeks Chinese Investments for Gujarat,” *The Economic Times*, Update terakhir 9 November 2011, <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/narendra-modi-seeks-chinese-investments-for-gujarat/articleshow/10667923.cms>.

Atas kedekatannya dengan China, tak ayal bahwa investasi terbesar China di India berada di Gujarat, yaitu sebesar \$ 900 juta di era Modi. Di awal masa baktinya sebagai Perdana Menteri, Modi melanjutkan hubungan baik itu melalui penandatanganan 24 poin perjanjian *Government to Government (G to G)* dan dua *joint statements* pada 14-16 Mei 2015. Pada 17-19 Desember 2014, Xi Jinping mengunjungi India untuk penandatanganan MoU untuk 16 perjanjian. Kedua pertemuan tersebut menyepakati kerjasama di berbagai sektor.<sup>123</sup>

Terpilihnya Modi sebagai Perdana Menteri India tentunya membawa angin segar bagi China pada masa itu. Di awal-awal masa jabatannya sebagai Perdana Menteri India, Modi diyakini akan melunak dengan China, bahkan ada sejumlah pihak yang meyakini bahwa Modi akan menjadi “*the next Richard Nixon*” versi India.<sup>124</sup> Hal itu membuat negeri Tirai Bambu yakin akan bisa menggaet India sebagai partner dalam BRI, terkhusus melalui proyek BCIM. Tetapi hal itu belum terbukti hingga periode kepemimpinan Modi berakhir. Memang tidak mudah untuk menjalankan kerjasama ditengah permasalahan perbatasan yang telah ada sejak lama.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup>Ministry of External Affairs, *India-China Bilateral Relations*, [https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/China\\_October\\_2017.pdf](https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/China_October_2017.pdf)

<sup>124</sup>Richard Nixon adalah Presiden Amerika Serikat ke-37 pada masa bhakti 1969-1974 yang meningkatkan hubungan baik dengan China, salah satunya melalui kerjasama perdagangan.

<sup>125</sup>Shannon Tiezzi, “Why China Embraces Narendra Modi,” *The Diplomat*, 29 Mei 2014, <https://thediplomat.com/2014/05/why-china-embraces-narendra-modi/>.

## 1. Citra Modi tentang Kebuntuan Doklam

Kebijakan luar negeri dalam menanggapi krisis yang terjadi di Doklam ini masuk dalam kategori keputusan kritis, yaitu kombinasi dari keputusan yang bersifat umum dan administratif. Keputusan krisis ini membawa kesan mendadak, mengejutkan, terancam dan terbatas oleh waktu, namun juga berdampak pada keberlangsungan hubungan dengan negara lain, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga keputusan juga saling terkait satu sama lain.

Faktor terpenting dalam penentuan kebijakan luar negeri adalah citra. Citra yang dimaksud adalah gambaran pengambil keputusan terhadap permasalahan politik luar negeri yang mereka hadapi, tentunya melalui informasi yang mereka terima dan pengalaman-pengalaman, seperti pengalaman beliau memimpin India di Gujarat. Menyangkut bagaimana signifikansi masalah tersebut dari sudut pandang *decision maker* untuk mempertimbangkan sikap atau kebijakan apa yang akan diambil oleh negaranya. Citra Modi tentang sengketa di Doklam setidaknya tergambar dalam sebuah wawancara yang dilakukan di stasiun televisi di India. Dalam wawancara tersebut, Modi menjelaskan bahwa:

*“India should be judged on the basis of its response in Doklam. And nothing has happened with India that can be considered as deceit. But our principled position has been that we want friendly relations with neighbours. All Indian governments have maintained this.”*<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup>PM Narendra Modi's Interview to Ani: Full Transcript, "NDTV, 2 Januari 2017, <https://www.ndtv.com/india-news/pm-narendra-modi-interview-to-ani-full-transcript-1971143>.

Modi mengungkapkan bahwa memang sepatutnya India dikritik atas tanggungjawabnya di Doklam. Namun India tidak mengalami apa-apa terkait sengketa tersebut, dalam artian India tidak mengalami kerugian. Modi menegaskan bahwa mereka berpegang teguh pada prinsip keharmonisan hubungan dengan tetangga. Keharmonisan hubungan dengan tetangga yang dimaksud tentunya mengacu pada kebijakan luar negeri *neighbourhood first* India yang digagas di era kepemimpinan Modi. Citra akan hubungan baik dengan China ini tak lepas dari pengalamannya ketika di Gujarat, seperti yang telah penulis jelaskan.

Seorang senior dalam institut pertahanan di China mengungkapkan bahwa kunjungan Modi ke Wuhan beberapa waktu lalu merupakan sebuah “kemenangan” Bagi China. Hal itu terjadi jika dikaitkan dengan tradisi kekaisaran bahwasanya mereka hampir tidak pernah meninggalkan China untuk urusan pertemuan dengan pemimpin asing. Dalam artian pemimpin asing-lah yang mendatangi China.<sup>127</sup>

#### 1. Dukungan Birokrasi Kementrian Luar Negeri India

Selain pengambilan kebijakan luar negeri sebagai tugas intelektual dan tunduk pada faktor-faktor psikologis pemimpin, pengambilan kebijakan luar negeri juga ditentukan oleh faktor-faktor organisasional terkait. Organisasi

---

<sup>127</sup>Abhijit Iyer-Mitra, “Modi-Xi Summit: Can India Celebrate ‘Success’ at Wuhan, Cautiously?”, *Business Standard*, 3 Mei 2018, [https://www.business-standard.com/article/economy-policy/modi-xi-summit-can-india-celebrate-success-at-wuhan-cautiously-118050300133\\_1.html](https://www.business-standard.com/article/economy-policy/modi-xi-summit-can-india-celebrate-success-at-wuhan-cautiously-118050300133_1.html).



### C. Kondisi Politik dalam Negeri India

Dalam teori yang digunakan pada penelitian ini, lingkungan internasional berfungsi sebagai stimulus terhadap pembentukan citra dalam pengambilan keputusan, terutama bagi pengambil keputusan dan *policy influencers*. Stimulus tersebut akan menghasilkan citra dan pandangan yang berbeda bagi mereka. Perbedaan tersebut mendorong aktor-aktor untuk mengambil posisi yang berbeda terhadap bidang isu. Dalam studi kasus ini, menurut penulis, bidang isu yang menjadi perhatian adalah keamanan nasional. Dimana dalam bidang isu ini, terkhusus dalam sistem pemerintahan yang terbuka, *partisan influencers* memainkan peran terpenting dibanding ketiga *policy influencers* yang lain. Sementara massa, birokratis dan kepentingan—berada dibelakang partisan.

Selain berkaitan dengan isu keamanan nasional, isu sengketa perbatasan ini berkaitan dengan bidang isu ideologis dan historis. Isu historis dan ideologis meliputi perselisihan teritorial dan juga isu hubungan dengan negara lain. Namun yang berselisih mengenai perbatasan di sini adalah China dengan Bhutan, bukan India. Tetapi secara historis, India-China telah mengalami perselisihan masalah perbatasan di tiga sektor sepanjang perbatasan China, seperti yang telah dijelaskan pada sub bab konteks internasional.

Dalam isu historis-ideologis, kehadiran *interest influences* memuncaki daftar yang memainkan peran penting dalam pemerintahan terbuka. Sementara partisan berada di urutan kedua, diikuti dengan massa dan birokratis sebagai

*influencers* paling lemah. Setelah meninjau data-data yang ada, penulis tidak menemukan *interest influencers* yang berperan dalam sikap diamnya India ini.. Kehadiran *interest influencer* ini memang mungkin ada walau mungkin berperan kecil dalam penentuan kebijakan. Karena seperti yang telah diutarakan penulis bahwasanya isu ini lebih berkaitan dengan keamanan nasional yang menempatkan partisan sebagai *influencers* teratas. Penulis menggarisbawahi bahwasanya dalam kedua isu, baik dalam isu keamanan dan ideologis-historis menunjukkan bahwa *partisan influencers* berperan penting.

Selain itu, terlihat upaya pemerintah untuk mengendalikan opini publik. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah pemberitaan yang dilakukan media India ketika konflik tersebut berlangsung. Sementara opisisi, salah satunya Rahul Gandhi sebagai Presiden di *Indian National Congress* juga kerap melontarkan kritik terhadap Narendra Modi, namun itu mungkin hanya sampai pada tahap kritik, tak sampai pada tahap selanjutnya. Seperti yang diungkapkan Coplin bahwa oposan sering dibatasi ruang geraknya dengan alasan tuntutan keamanan dan kerahasiaan.

1. Kedekatan *Bharatiya Janata Party* (BJP) dengan *Communist Party of China* (CPC)

BJP adalah partai yang saat ini berkuasa di India yang merupakan *partisan influencers* bagi Modi. Kedekatan Modi dengan BJP telah berlangsung sejak 1987, sejak ia bergabung. Pada 15 November 2014, atau hampir 6 bulan setelah Modi dilantik, delegasi partai BJP melakukan kunjungan ke China, ke Beijing dan Guangzhou untuk kunjungan selama seminggu. Delegasi dari BJP

yang berjumlah 13 orang itu mencoba menggali ilmu dengan partai tunggal di China sekaligus partai terbesar di dunia, yaitu *Communist Party of China* (CPC), atau Partai Komunis China. Di sana mereka belajar mengenai struktur internal CPC, fungsi politik dan peran CPC dalam mensejahterakan kehidupan bernegara.

Dalam kunjungan ke “Sekolah Partai” tersebut, BJP mendelegasikan sekretarisnya, Shrikant Sharma. Delegasi tersebut akan berinteraksi dengan para pemimpin dan kader BPK, dari akar rumput hingga Komite Sentral dan Politbiro. Pelatihan seperti itu sebenarnya telah dilakukan oleh Narendra Modi. Program seperti itu dirasakan perlu untuk untuk melatih kader-kader menengah dan senior partai. Mantan Presiden partai untuk negara bagian Uttarakhand, Bhagat Singh Koshyari mengatakan: “*The delegation will also emphasize on establishing and strengthening relations between the two ruling parties.*” Sementara Menteri luar negeri India menyatakan bahwa tujuan kunjungan tersebut adalah, “*support the ongoing efforts to remove the minor irritants in political, economic and geographical areas*”. Swaraj juga menambahkan,” *about the positive steps initiated by the Narendra Modi government in establishing cordial relations with all neighboring countries and particularly with China.*” Sekretaris Jenderal BJP, Ram Madhav menyatakan bahwa niatan baik kunjungan level *party to party* itu akan menguatkan hubungan bilateral antara India dengan China. Kedua pemimpin

negara, Modi dan Xi setuju untuk membuat interaksi yang lebih besar dengan antara BJP dan CCP ketika Xi Jinping mengunjungi India.<sup>130</sup>

Narendra Modi dan Xi Jinping merupakan elit di partai mereka masing-masing. Modi adalah pemimpin kabinet dan *Lok Sabha* (Parlemen India), sementara Xi adalah sekretaris jenderal di CPC yang merupakan partai tunggal di China. BJP yang menguasai Lok Sabha menjadi pemenang pada pemilu 2014 dengan raihan 282 kursi dari total 543 kursi di parlemen atau sebanyak 51,9%, jauh mengungguli dua rival terdekatnya, yaitu *Indian National Congress* (INC) dan *All Indian Trinamool Congress* (AITC). INC, partai yang dipimpin oleh Rahul Gandhi tersebut hanya memperoleh 8,1% suara di parlemen atau sebanyak 44 kursi. Kemudian disusul oleh AITC yang memperoleh 6,3% perolehan suara, atau sebanyak 34 kursi. Sebanyak 33,7% suara diraih oleh partai-partai lainnya. Pada 2019, BJP kembali meraih kemenangan yang lebih besar, yaitu 303 dari total 542, atau 55,9% yang mengantarkan Modi kembali menduduki kursi perdana menteri untuk periode 2019-2024.<sup>131</sup>

## 2. Meredam Opini Publik Tentang Doklam

Dalam menghadapi kerumitan yang terjadi di Doklam, pemerintah India berhasil meredam isu tersebut hingga tidak ada kerisauan di publik India. Hal

---

<sup>130</sup>Archis Mohan, "BJP Legislator Tak Lesson at School run by Communist Party of China," *Business Standard*, 15 November 2014, [https://www.business-standard.com/article/politics/bjp-legislators-take-lessons-at-school-run-by-communist-party-of-china-114111501563\\_1.html](https://www.business-standard.com/article/politics/bjp-legislators-take-lessons-at-school-run-by-communist-party-of-china-114111501563_1.html).

<sup>131</sup>Election Commission of India, *General Election to Lok Sabha Trends & Result 2019*, <http://results.eci.gov.in/pc/en/partywise/index.htm>.





Rahul Gandhi saat ini adalah oposisi yang merupakan salah satu penantang terkuat Modi di pemilihan umum 2019, namun pada akhirnya ia kalah dan Narendra Modi menduduki periode kedua masa kepemimpinannya. Seperti yang telah dijelaskan pada teori Coplin, pertimbangan suara oposisi dalam pengambilan keputusan relatif kecil implementasinya, hal itu terjadi dalam studi kasus ini.

#### **D. Tinjauan Ekonomi dan Militer India**

Di periode modern ini, basis kemakmuran dan kemampuan militer mengalami transformasi. Berbeda dengan era sebelumnya: era pascafeodal dan periode klasik. Di era pascafeodal, ekonomi pertanian menimbulkan lapisan masyarakat kelas atas yang bebas menyediakan kekuatan militer. Sementara di periode klasik, emas menjadi sumber kemakmuran dan kemampuan militer.

##### **1. Ekonomi India**

Fokus Pemerintahan Narendra Modi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi tampaknya mulai membuahkan hasil yang positif. Pada periode 2014 hingga 2017, ekonomi India menduduki rata-rata pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) tertinggi dunia, yaitu 7,3 persen. Mengungguli China yang berada di posisi kedua dengan “hanya” pada angka 6,9 persen. sementara rata-rata global adalah sebesar 3,4 persen. India juga menempati peringkat pertama dalam *emerging market and developing economies* (EMDE), yaitu sebesar 4 persen, lebih tinggi daripada rata-rata global yang hanya sekitar 3 persen.

Terlihat progres orientasi politik luar negeri Modi, dimana salah satunya di sektor ekonomi. Dalam mencapai hal itu, tentunya diperlukan kebijakan yang melindungi produk dalam negeri dari persaingan produk asing/impor, seperti kebijakan *anti-dumping duty*.<sup>137</sup>

Dari sektor ekspor-impor, India mengantisipasi dumping impor baja murah dari China, Korea Selatan dan Ukraina. Pemerintah menaikkan bea cukai dan memberlakukan peraturan *anti-dumping duty*. Peraturan itu diterapkan pada bulan Februari 2017. Sementara pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai tekstil.<sup>138</sup> India pertama kali melakukan investigasi anti-dumping pada tahun 1992. Pada 2005, India melakukan investigasi anti-dumping pada 188 kasus pada 35 negara, termasuk China, Jepang, Uni Eropa (dihitung sebagai satu teritorial) dan lain-lain.<sup>139</sup>

Sempat beredar pemberitaan di media massa mengenai rencana pemerintah menetapkan *bea anti-dumping* terhadap 93 produk China pada tahun 2017. Hal itu bahkan dikaitkan dengan kebuntuan yang terjadi di Doklam di 2017. Namun hal itu diklarifikasi oleh pemerintah melalui laman website kedutaan besar India di Beijing yang menyatakan bahwa berita tersebut secara faktual salah. Bahan Kimia dan petrokimia, produk baja dan logam lainnya,

---

<sup>137</sup>National Informatic Centre, *An Overview of India's Economic Performance in 2017-18*, [http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/001-027\\_Chapter\\_01\\_Economic\\_Survey\\_2017-18.pdf](http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/001-027_Chapter_01_Economic_Survey_2017-18.pdf). 3 April 2019.

<sup>138</sup>Ibid.

<sup>139</sup>Anti-dumping Cases in India Product and Profiles, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, [http://commerce.gov.in/writereaddata/traderemedies/productprofile/cases\\_1.pdf](http://commerce.gov.in/writereaddata/traderemedies/productprofile/cases_1.pdf).

serat dan benang, item mesin, produk karet atau plastik, barang listrik dan elektronik, barang listrik dan elektronik, barang konsumen dan lain-lain. Keputusan memberlakukan 93 bea anti-dumping ini pada produk-produk yang berasal dari Cina diambil selama 5 tahun sebelumnya.

Setelah meninjau data-data mengenai perekonomian India dan hubungannya dengan China, penulis melihat tidak ada korelasi secara langsung dengan sikap diamnya India, jika ditinjau dari faktor ekonomi. Termasuk hubungannya dengan *anti-dumping duty*. Karena kebijakan anti-dumping tersebut juga dilakukan India terhadap negara lain. Pun kebijakan tersebut juga bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk asing. Kemudian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah jatuh di tahun 2013. Sesuai dengan visi yang diemban oleh program *Make in India*. Namun pasti ada korelasi antara faktor ekonomi dengan militer. Paling tidak ekonomi yang kuat berimplikasi pada besaran anggaran militer India.<sup>140</sup>

## 2. Dimensi Militer

Dalam *foreign policy decision making process theory* menurut William D. Coplin, kekuatan militer suatu negara tidak hanya bergantung pada faktor-faktor internal seperti jumlah tentara, pelatihan dan perlengkapan, tetapi juga dukungan dari negara lain dan peran angkatan bersenjata dalam memelihara stabilitas dalam negeri. Dalam hal jumlah pasukan, India sedikit lebih unggul

---

<sup>140</sup>Embassy of India, *Press Release-Anti-Dumping-Duties on Imports From China*, 22 Agustus 2017, <http://www.eoibeijing.gov.in/anti-dumping.php>.

dibandung China. Tetapi dari segi perlengkapan militer, China jauh lebih unggul. Sementara dari segi dukungan luar negeri, China mengimbangi India di Asia Selatan dengan Pakistan sebagai Partner. China telah membantu Pakistan dalam pengembangan militer dan senjata nuklir. Dari segi ekonomi, Pakistan beraliansi dengan China untuk tujuan ekonomi melalui CPEC. Di lain sisi, Pakistan bersama tetangga India yang lain menggunakan China untuk melawan dominasi India di kawasan, atau paling tidak mengimbangi hubungan antara India dengan China. Untuk melihat kapasitas militer India dan China, penulis membuat tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kekuatan Militer India dan China

No	Pengeluaran Militer dan jumlah pasukan	India	China
1	Anggaran Militer (% GDP)	2,419 (2018)	1,866 (2018)
2	Anggaran Militer (dalam Dolar Amerika Serikat)	66.510,0289.11 (2018)	249,996,900.64 (2018)
3	Anggaran Militer (% pengeluaran pemerintah pusat)	8,737 (2018)	5,485 (2018)
4	Jumlah personel tentara	3, 031,000 (2017)	2,695,000 (2017)
5	Jumlah tentara (% tenaga kerja)	0.602 (2017)	0.341 (2017)

Sumber: “Military Expenditure (% of General Government Expenditure),”  
*The World Bank*, diakses pada 7 Agustus 2019,  
[https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.ZS?end=2018&most\\_recent\\_value\\_desc=false&start=2018&type=shaded&view=map&year=2018](https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.ZS?end=2018&most_recent_value_desc=false&start=2018&type=shaded&view=map&year=2018).

Baik China maupun India sama-sama memiliki kedekatan dengan Rusia sebagai salah satu negara dengan militer terkuat. Namun secara natural, India lebih berpeluang beraliansi dengan Amerika Serikat (AS) mengingat hubungan China dengan AS yang sedang pasang, terutama terkait perang dagang kedua negara.<sup>141</sup> Namun penulis meyakini jikalau India dan *vis-à-vis* dengan China, niscaya India akan mengalami kekalahan. Sebab dari setiap perbatasan, mulai dari Arunachal Pradesh, pertigaan Doklam hingga Jammu dan Kashmir (J&K), India kekurangan infrastruktur perbatasan. Terlebih, wilayah J and K juga dikuasai Pakistan dan China.

Arunachal Pradesh, J dan K, dan pertigaan Doklam menjadi ‘pintu masuk’ ancaman militer China terhadap India. Walaupun China hanya memiliki 2,695,000 tentara (India berjumlah 3,031,000), tetapi China memiliki keunggulan infrastruktur perbatasan, komunikasi, pesawat dan jet tempur. Tercatat China memiliki 653 pesawat tempur (jenis Mirage-2000 atau terbaru) dibanding India yang hanya memiliki 349. Dari segi pangkalan udara, China juga lebih unggul. Kekuatan China di organisasi internasional seperti *United Nations Security Council* (UNSC) hingga *Nuclear Suppliers Group* (NSC)

---

<sup>141</sup>Rajesh Rajagopalan, *India's Strategic Choices: China and the Balance of Power in Asia* (Massachusetts: Publications Department of Carnegie Endowment for International Peace, 2017), 7, [https://carnegieendowment.org/files/CP\\_312\\_Rajesh\\_Strategic\\_Choices\\_FNL.pdf](https://carnegieendowment.org/files/CP_312_Rajesh_Strategic_Choices_FNL.pdf).

telah terbukti menjadi penghalang India untuk menjalankan ambisi politik luar negerinya. Terbaru, China menghalangi India untuk bergabung dengan NSG. Selain itu, China juga memiliki hak veto di PPB bersama empat negara lain, yaitu Russia, Inggris, Prancis dan Amerika Serikat.<sup>142</sup>

Dugaan terhadap PLA melintasi *Line of Actual Control* (LAC) di Uttarakhand, batas de facto China-India, yaitu pesawat militer yang melakukan pengintaian dan 20-25 tentara India melintasi zona demiliterisasi di Barohati.<sup>143</sup> India dan China mempunyai pola pikir yang berbeda dalam menyikapi perbatasan kedua negara. Setelah kekalahan 1962, India ragu membangun jalan infrastruktur di LAC karena khawatir tentara China akan mudah menyerang India. Akhirnya pemerintah merencanakan pembuatan 73 jalan strategis di sekitar LAC. Namun hingga 2016, hanya 21 jalan yang terselesaikan. Sementara untuk jalur kereta, baru di tahun 2010 India mengidentifikasi 28 jalur kereta strategis di perbatasan China. Alotnya pembangunan infrastruktur perbatasan di China tidak lain karena permasalahan dalam negeri seperti korupsi, keterbatasan anggaran, birokrasi, medan yang sulit dan lain sebagainya.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup>Frank O'Donnell, *Stabilizing Sino-Indian Security Relations: Managing Strategic Rivalry After Doklam* (Beijing: Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, 2018), 7, [https://carnegieendowment.org/files/CP335\\_ODonnell\\_final.pdf](https://carnegieendowment.org/files/CP335_ODonnell_final.pdf).

<sup>143</sup>"Chinese Army Carried out Air Sorties Ahead Transgression in Uttarakhand," diupdate 1 Agustus 2016, <https://timesofindia.indiatimes.com/india/Chinese-army-carried-out-air-sorties-ahead-of-transgression-in-Uttarakhand/articleshow/53476237.cms>.

<sup>144</sup>Sudha Ramachandran, "China and India's Border Infrastructure Race," *China Brief Volume* 16, no. 14, (13 September 2016). <https://jamestown.org/program/china-and-indias-border-infrastructure-race/>.

Sementara China mempunyai pola pikir berbeda mengenai infrastruktur perbatasan. Sebelum pecah perang Sino-India, China telah mulai membangun infrastruktur di di Himalaya di tahun 1950. Mereka berprinsip “pembangunan jalan diperlakukan sebagai pertempuran” sebagai sikap tegas untuk menguasai Tibet. Bahkan Mao Zedong memerintahkan “Maju sambil membangun jalan”. Alhasil pembangunan jalan dan jalur kereta api China telah menuju perbatasan India, Nepal dan Bhutan. Pembangunan jalan oleh China telah melintasi mendekati bahkan ada yang melintasi sisi perbatasan India, seperti jalan 5 km di Ladakh, India. Berbanding terbalik dengan India yang banyak berhenti jauh sebelum mencapai LAC, bahkan 50-70 km sebelum perbatasan yang mengalami masalah sengketa.<sup>145</sup>

Banyak ahli strategi India percaya bahwa China secara militer mendominasi wilayah konflik perbatasan. Sementara banyak analis China menganggap bahwa sikap militer India menunjukkan hasrat kekuatan besar, lebih dari respons defensif terhadap agresi militer China di perbatasan. Tantangan besar bagi China dan India adalah menurunnya kepercayaan dan menghasilkan *security dilemma* di antara mereka.<sup>146</sup>

Pengembangan militer India yang progresif untuk menjaga perbatasan bertujuan defensif terhadap militer China. India perlahan mulai meningkatkan

---

<sup>145</sup>Ibid.

<sup>146</sup>Frank O'Donnell, *Stabilizing Sino-Indian Security Relations: Managing Strategic Rivalry After Doklam* (Beijing: Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, 2018), 3, [https://carnegieendowment.org/files/CP335\\_ODonnell\\_final.pdf](https://carnegieendowment.org/files/CP335_ODonnell_final.pdf).

kekuatan dan pasukan udara di perbatasan China. India telah menurunkan 35.000 pasukan di Arunachal Pradesh dalam misi pertahanan pada tahun 2009-2010. Pada 2021 nanti, India berencana menambah kekuatan sebanyak 35.000 pasukan untuk menghadapi China. Ditambah lagi pasukan yang diperkirakan sebanyak 221.000 di bagian barat, tengah dan bagian timur yang dekat batas sesungguhnya. Peningkatan itu, menurut analis China adalah sebagai sikap ofensif militer yang sangat berseberangan dengan pembicaraan secara diplomatik, apalagi kerjasama ekonomi. Tetapi terlalu dini bagi China untuk memutuskan menurunkan pasukan China untuk semakin mendekati wilayah perbatasan India.<sup>147</sup>

Dalam pemeringkatan *global fire power*, kekuatan militer India berada di peringkat 4 dunia, satu tingkat di bawah China yang menduduki peringkat 3 Dunia. Kebangkitan militer China yang pesat menjadi ancaman matriks bagi India. Kemajuan ekonomi China dalam beberapa dekade terakhir memberi sumbangsih pengembangan militer China. Militer China kini mempunyai doktrin baru, yaitu "*informationised warfare*" yang telah terpublikasi sejak Mei 2015. Doktrin itu berlaku untuk angkatan darat, laut dan udara.

a. Komparasi Nuklir India dengan China

Seperti yang kita ketahui, India adalah negara terbesar di dunia yang menganut sistem pemilihan umum secara demokrasi, otomatis India menganut

---

<sup>147</sup>Ibid., 3.

sistem yang terbuka. Sementara China menganut sistem pemilihan secara hirarkis, yaitu melalui kongres. Dukungan *Policy Influencer* untuk pengembangan nuklir dalam kedua sistem sangat dibutuhkan, namun yang lebih berpeluang mendapat dukungan penuh adalah sistem pemerintahan seperti China karena kebijakan pengembangan nuklir di India akan mendapat kemungkinan dipertentangkan oleh *policy influencers*, sementara di China, peluang *policy influencer* untuk mempertentangkan kebijakan nuklir cukup kecil. Hal itu terbukti karena China memiliki keunggulan dalam jumlah dan kapasitas senjata nuklir.

Secara keseluruhan, jumlah hululedak yang dimiliki India berjumlah 130-140 hululedak. Sejauh ini, India memiliki tiga atau empat pesawat Squadron Mirage 2000H dan Jaguar IS/IB, pada tiga basis, diperkirakan disiapkan sebagai misi serangan balik terhadap Pakistan dan China. selain itu, ada empat tipe basis darat rudal balistik berkemampuan nuklir. Berdasarkan pemantauan satelit, lokasi pengembangan nuklir yang sudah pasti adalah Jalandhar di Punjab, Banar dan Bikaner, dan Jodhpur di Rajastan. Salah satu basis darat Agni-2, berkemungkinan dipersiapkan untuk wilayah China bagian barat, tengah dan selatan. Agni-4 yang berada di India bagian Timur laut mampu memusnahkan hampir seluruh China. Selain itu, India juga memiliki Agni-5 yang memiliki jarak tempuh *longer-range* yang hampir setara dengan *intercontinental ballistic Missile (ICBM)*, dengan jarak tempuh lebih dari 5.000

kilometer. Jarak tempuh *extra-range* akan membuat India membangun Agni-5 yang berbasis di India bagian Tengah dan selatan, yang lebih jauh dari China.<sup>148</sup>

Tabel 4.2. Nuklir India

Type	NATO designation	Number of launchers	Year deployed	Range <sup>a</sup> (kilometers)	Warhead x yield (kilotons)	Number of warheads
<b>Aircraft</b>						
Vajra	Mirage 2000H	~16	1985	1,850	1 × bomb	~16
Shamsher	Jaguar IS/IB	~32	1981	1,600	1 × bomb	~32
Subtotal:		~48				~48
<b>Land-based ballistic missiles</b>						
Prithvi-II	n.a.	~24	2003	350 <sup>b</sup>	1 × 12	~24
Agni-I	n.a.	~20	2007 <sup>c</sup>	700+	1 × 40	~20
Agni-II	n.a.	~8	2011 <sup>d</sup>	2,000+	1 × 40	~8
Agni-III	n.a.	~8	2014 <sup>e</sup>	3,200+	1 × 40	~8
Agni-IV	n.a.	n.a.	(2018)	3,500+	1 × 40	n.a.
Agni-V	n.a.	n.a.	(2020)	5,200+	1 × 40	n.a.
Subtotal:		~60				~60 <sup>f</sup>
<b>Sea-based ballistic missiles</b>						
Dhanush	n.a.	2	2013	400	1 × 12	4
K-15	(Sagarika)	(12)	(2018)	700	1 × 12	(12)
K-4	n.a.	(4)	?	3,500	1 × ?	0
Subtotal:		(18)				(16)
<b>Total</b>						<b>130-140<sup>f</sup></b>

Sumber: Hans M. Kristensen dan Matt Korda, “Indian nuclear forces, 2018,” *Bulletin of the Atomic Scientists* 74, no. 6, 361-366, DOI: 10.1080/00963402.2018.1533162, <https://doi.org/10.1080/00963402.2018.1533162>.

Pengembangan Nuklir India bertujuan sebagai “*deterrence*” terhadap Pakistan dan tekanan dari strategi masa depan dalam hubungan dengan China. Pada konflik perbatasan dengan Pakistan pada 2016, India yang telah lama menggunakan kebijakan *no-first-use*, melemahkan kebijakan itu sendiri dengan berpotensi menggunakan senjata nuklir dalam merespons serangan senjata kimia atau biologi. Tapi terjadi perdebatan di tubuh pemerintahan India

<sup>148</sup>Hans M. Kristensen dan Matt Korda, “Indian nuclear forces, 2018,” *Bulletin of the Atomic Scientists* 74, no. 6, 361-366, DOI: 10.1080/00963402.2018.1533162, <https://doi.org/10.1080/00963402.2018.1533162>.

yang mempertimbangkan menggunakan senjata nuklir. Bahkan Menteri pertahanan (dalam opini pribadinya) menandai bahwa India tidak harus terikat pada kebijakan tersebut.<sup>149</sup>

Sementara China memiliki jumlah hululedak sebanyak 280 hululedak, dua kali lipat dibandingkan hululedak yang dimiliki China. secara kontinu terus mengembangkan program nuklirnya sejak inisiatif nuklir yang dimulai sejak 1980-an. Sejak 2016, China mengembangkan versi baru dari rudal balistik medium-range, sebuah *mobile rudal balistik dual-capable* jarak *intermediate-range*, dan meningkatkan road-mobile untuk peluncuran ICBM. Hingga saat ini terdapat 280 hululedak di China, sementara China hanya 130 hululedak. Hasil modernisasi ICBM, yaitu DF-31 mempunyai jarak tempuh 7.000 kilometer, sangat kapabel untuk menjangkau India dan Rusia, tetapi tidak mampu menjangkau Amerika Serikat, yang sebelumnya merupakan jangkauan dari rudal jenis DF-4. China kemungkinan telah mengembangkan rudal long-based *short-range* yang bisa menjangkau India dari dekat perairan, Rusia, Alaska (Amerika Serikat) Hawaii dan Guam.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup>Som, V. 2016. "Defence Minister Manohar Parrikar's Nuclear Remark Stressed As 'Personal Opinion,'" *NDTV*, 10 November. <http://www.ndtv.com/india-news/defenceminister-manohar-parrikars-nuclear-remark-stressed-as -personal-opinion-1623952>.

<sup>150</sup>Hans M. Kristensen dan Robert S. Norris, "Chinese Nuclear Forces, 2018," *Bulletin of the Atomic Scientists* 74, no. 4, 289-295, DOI: 10.1080/00963402.2018.1486620.

Tabel 4.3. Nuklir China

Type	NATO designation	Number of launchers	Year deployed	Range (kilometers)	Warhead x yield <sup>a</sup> (kilotons)	Number of warheads
<b>Land-based ballistic missiles</b>						
sDF-4	CSS-3	~5	1980	5,500+	1 x 3,300	~10
DF-5A	CSS-4 Mod 2	~10	1981	13,000+	1 x 4,000–5,000	~10
DF-5B	CSS-4 Mod 3	~10	2015	~13,000	3 x 200–300	~30
DF-15	CSS-6	?	1990	600	1 x ?	? <sup>b</sup>
DF-21	CSS-5 Mods 2, 6	~40	1991, 2000, 2016	2,150	1 x 200–300	~80 <sup>c</sup>
DF-26	?	16	(2017)	4,000+	1 x 200–300	16
DF-31	CSS-10 Mod 1	~8	2006	7,000+	1 x 200–300	~8
DF-31A	CSS-10 Mod 2	~32	2007	11,000+	1 x 200–300	~32
DF-31AG <sup>d</sup>	(CSS-10 Mod 3?)	(16)	(2017)	?	(1 x ?)	?
DF-41	CSS-X-20	n.a.	?	?	n.a.	n.a.
<i>Subtotal:</i>			~121			~186 <sup>e</sup>
<b>Submarine-launched ballistic missiles<sup>f</sup></b>						
JL-2	CSS-N-14	48	(2016)	7,000+	1 x 200–300	48
<b>Aircraft</b>						
H-6 <sup>g</sup>	B-6	(~20)	1965	3,100+	1 x bomb (1 x ALBM)	(~20)
Fighters <sup>h</sup>	?	?	?	n.a.	1 x bomb	?
<b>Cruise Missiles<sup>i</sup></b>						
<b>Total</b>						<b>~254 (280)<sup>j</sup></b>

Sumber: Hans M. Kristensen dan Robert S. Norris, “Chinese Nuclear Forces, 2018,” *Bulletin of the Atomic Scientists* 74, no. 4, 289-295, DOI: 10.1080/00963402.2018.1486620.

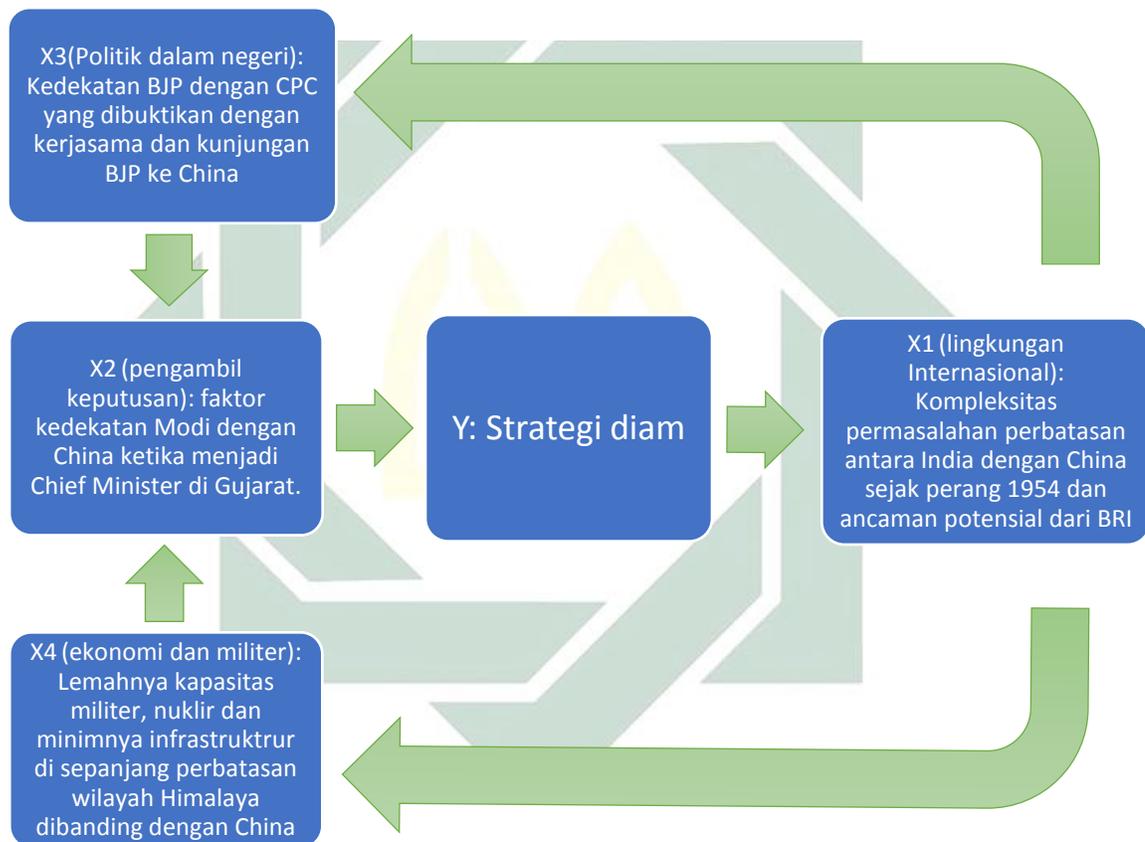
China adalah satu-satunya negara yang berkekuatan besar dunia yang menolak berdiskusi dengan India terkait isu nuklir, hal itu terjadi karena ketakutan berimplikasi pengakuan secara *de facto* dari status India sebagai kekuatan nuklir.<sup>151</sup> Sementara Pakistan, yang merupakan rival India memiliki jumlah total senjata nuklir sebanyak 140-150, lebih banyak dari India. Pengembangan nuklir Pakistan dengan berbagai kapabilitas bertujuan defensif terhadap serangan India. Pakistan di sini bisa menjadi proxy bagi China.<sup>152</sup>

<sup>151</sup>Ibid., 289-295.

<sup>152</sup>Carnegie Endowment for International Peace 2015, 4 dalam Hans M. Kristensen, Robert S. Norris dan Julia Diamond, “Pakistani nuclear forces, 2018,” *Bulletin of the Atomic Scientists* 74, no. 5, 348-358, DOI: 10.1080/00963402.2018.1507796.

## E. Interaksi antar Variabel-Variabel dalam Membentuk Strategi Diam India

Bagan 4.1. Interaksi antar Variabel-variabel dalam Membentuk Strategi Diam India



Dalam bagan ini, terlihat interaksi antar variabel dalam menghasilkan sikap diam India. Pertama dari Variabel X1 atau konteks internasional. Variabel ini berinteraksi dengan Variabel X3 dengan X4, yaitu politik dalam negeri dan kondisi ekonomi dan militer. Pada politik dalam negeri terdapat *partisan influencer* yang sebenarnya tidak begitu memiliki perhatian terhadap konteks internasional, mereka

lebih memandang hubungan dengan China lebih ke arah kooperatif, tepatnya melalui kerjasama antara BJP dengan CPC. Sementara dalam interaksinya dengan kondisi ekonomi dan militer, konteks internasional selaku variabel X1 di sini cukup berpengaruh, bahkan bisa dibilang pengaruhnya kuat. Karena kompleksitas permasalahan perbatasan dan ancaman BRI “memberikan gambaran” kepada militer India agar meningkatkan kapasitasnya. Secara *head-to-head*, China lebih unggul dibandingkan India mulai dari ekonomi-militer, infrastruktur perbatasan hingga kekuatan nuklir. Ditambah lagi dengan eksistensi Pakistan yang terus mengalami pasang surut dengan India dan hubungannya yang harmonis dengan China.

Untuk variabel X2, Narendra Modi sebagai pengambil keputusan pada dasarnya memiliki pengalaman menjalin hubungan baik dengan China kala menjadi Ketua Menteri di Gujarat. Bahkan Modi juga mengagumi orang-orang China dan ingin menjalin hubungan baik dengan China, seperti yang telah dijelaskan pada bab empat. variabel X3 dan X4 di sini mempengaruhi Narendra Modi dalam membentuk variabel Y.

Untuk X3, terdapat peran signifikan *partisan influencer*, yaitu BJP sebagai kendaraan Modi menuju kursi nomor satu Gujarat hingga menjabat perdana menteri India selama dua periode. Modi juga merupakan salah satu petinggi partai yang ikut membesarkan nama BJP sejak ia bergabung pada 1987. Kedekatan BJP dengan CPC tentu atas persetujuan Modi juga. BJP dan CPC sejauh ini menjalin hubungan baik, kedua partai penguasa tersebut ingin membuat hubungan kedua negara menjadi

semakin baik ke depannya, seperti yang dijelaskan pada bab empat, tepatnya pada sub bab kondisi politik dalam negeri India.

Sementara faktor ekonomi dan militer sebagai variabel X4 juga mempengaruhi pengambil keputusan dan menciptakan memproduksi variabel Y. Sama seperti kondisi ekonomi-militer dalam memandang konteks internasional Ditinjau dari segi militer, kapasitas alutsista, anggaran, infrastruktur pendukung di perbatasan serta kekuatan Nuklir, India jelas lebih tertinggal dibanding China. India hanya unggul dalam jumlah personel tentara, yaitu sebanyak 3,031,000, sedangkan China hanya memiliki 2,695,000 tentara.

Jadi dalam bagan tersebut, variabel X1 mempengaruhi X3 dan X4. Kemudian X3 dan X4 mempengaruhi variabel X2. Selain dipengaruhi oleh X3 dan X4, X2 ini juga memiliki aspek-aspek personalitas yang mempengaruhinya dalam mengambil kebijakan. Setelah adanya interaksi tersebut, barulah variabel X2 membuat kebijakan yang menghasilkan variabel Y berupa strategi diam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Strategi diam yang dilakukan India atas respons terhadap sengketa tidak bisa semata-mata diartikan sebagai ketidakpedulian terhadap Bhutan. Insiden Doklam hanya sedikit dari konflik perbatasan yang menjadi tugas India di sepanjang perbatasan dengan China di Himalaya. Apalagi India-China berbatasan langsung pada tiga sektor—yang secara historis telah menghadapi berbagai konflik sejak konflik perbatasan 1954 dan perang Sino-India pada 1962. Dan hingga saat ini belum ada solusi jitu untuk menuntaskan masalah perbatasan. Suatu dilema bagi India: harus mempertahankan Bhutan, tetapi juga dihadapkan dengan peliknya masalah perbatasan yang ia hadapi.

Analisis dari diamnya India selama lebih dari setahun insiden di pertigaan ketiga negara (Bhutan, China dan India) menurut penulis dengan menggunakan kacamata teori Coplin adalah: Pertama, Sejarah panjang konflik perbatasan China-India yang belum menemukan resolusi yang tepat dan ancaman potensial dari mega proyek geopolitik BRI China yang membayang-bayangi India di kawasan. Kedua, kedekatan psikologis Narendra Modi terhadap China, jika ditilik dari kerjasama dengan China yang mulai ia bangun sejak menjadi Chief Minister di Gujarat. Ketiga, Masifnya kerjasama antara BJP dan CCP sebagai sesama penguasa di kedua negara, apalagi Modi dan Xi sama-sama petinggi partai dari masing-

masing partai tersebut. Terakhir, kapasitas militer India yang masih kalah dibandingkan dengan PLA dari segi perlengkapan, infrastruktur hingga kekuatan nuklir. Memang kemungkinan perang terbuka di era ini lebih kecil dibanding beberapa dekade lalu dan signifikansi kekuatan militer juga tak seperti era perang dunia satu dan dua.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih dipenuhi dengan banyak kekurangan. Analisis yang dilakukan penulis bisa saja tidak mencapai akurasi yang tinggi. Tetapi penulis punya saran untuk pihak-pihak yang selanjutnya memiliki minat untuk meneliti topik terkait. Penulis menyarankan untuk menggali lebih dalam dan menggunakan varian konsep atau teori lain untuk mempelajari *political personality* atau idiosinkratik pengambil keputusan. Karena penulis mengalami kesulitan untuk memperoleh data mengenai hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Brownlie, Ian. *African Boundaries: A Legal and Diplomatic Encyclopaedia*. C. Hurst & Co., 1979.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Chomzah, Ali Achmad. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003.
- Coplin, D. William. *Introduction to International Politics: a Theoretical Overview*, diterjemahkan oleh Marsedes Marbun. Bandung: Penerbis Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Cottam, Martha L, dkk. *Pengantar Psikologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Farrel, R Barry dkk. *Approaches to International and Comparative Politics*. Evanston, III.: Northwestern University Press.
- Heilbroner, Robert L. *The Making of Economic Society*. New Jersey: Prentice Hall, 1962.
- Hilsman, Roger. *To Move A Nation*. New York: Doubleday, 1967.
- Luttwak, Edward N, *From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce*. National Interest: 1990.
- Masoed, Mochtar *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong, Lezy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2011.



- Baruah, Darshana M.. "India's Answer to the Belt and Road: A Road Map for South Asia." Carnegie India: *Working Paper*, (Agustus 2018).
- Basha, SK Chand. "Doklam crisis: Crux point for Geopolitical rivalry between India and China and posing threat to Eurasian stability," *International Journal of Advanced Research and Development* 2, no. 5 (2017):474-477.
- Chacko, Priya. "The New Geo-Economics of a "Rising" India: State Transformation and The Recasting of Foreign Policy." *Journal of Contemporary Asia* 45, no. 2 (2015):326-327.
- Ghatak, Maitreesh dan Sanchari Roy. "Did Gujarat's Growth Rate Accelerate Under Modi?." *Economic and Political Weekly*, 49, no. 15 (12 April 2014): 15.
- Goswami, Namrata. "The China Pakistan Economic Corridor, China, and Pakistan: More than just the Economy." *Scholar Warrior*, (Spring 2017): 39-40.
- Hudaya, Maula, dkk. "The Rise of Naval Power as an Response of Chinese and Pakistani CPEC (China Pakistan Economic Corridor)." Universitas Airlangga (5 April 2018).
- Joshi, Manoj. "The Wuhan Summit and India China Border Dispute." *Orf Special Report*, no. 62 (Juni 2018): 13, [https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2018/06/ORF\\_Special\\_Report\\_62\\_Wuhan.pdf](https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2018/06/ORF_Special_Report_62_Wuhan.pdf).
- Karim, Mohd Aminul dan Faria Islam. "Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) Economic Corridor." *The Korean Journal of Defense Analysis* 30, no. 2 (Juni 2018): 284.
- Kristensen, Hans M., dan Matt Korda. "Indian nuclear forces, 2018." *Bulletin of the Atomic Scientists* 74, no. 6, 361-366, DOI: 10.1080/00963402.2018.1533162. <https://doi.org/10.1080/00963402.2018.1533162>.
- Kristensen, Hans M., dan Robert S. Norris. "Chinese Nuclear Forces, 2018." *Bulletin of the Atomic Scientists* 74, no. 4, 289-295, DOI: 10.1080/00963402.2018.1486620. <https://doi.org/10.1080/00963402.2018.1486620>.
- Kristensen, Hans M., Robert S. Norris dan Julia Diamond." Pakistani nuclear forces, 2018." *Bulletin of the Atomic Scientists* 74, no. 5, 348-





- “Rahul Doklam jab at Sushma,” *The Telegraph*, 3 Agustus 2018, <https://www.telegraphindia.com/india/rahul-doklam-jab-at-sushma/cid/1353045>.
- “Why is PM Modi silent over the China stand-off, questions Rahul Gandhi.” *Hindustan Times*, 8 Oktober 2018, <https://www.hindustantimes.com/india-news/why-is-pm-modi-silent-over-the-china-stand-off-questions-rahul-gandhi/story-yZ63luYFs75EAxrqwgHzN.html>.
- Charlotte, Gao. “China Officially Sets Up Its First Overseas Base in Djibouti.” *The Diplomat*, 12 Juli 2017, <http://thediplomat.com/2017/07/china-officially-sets-up-its-first-overseas-base-in-djibouti/>.
- Colvin, Ross dan Sruthi Gottipati, “Interview With BJP Leader Narendra Modi.” *Reuters*, 12 Juli 2013, <http://blogs.reuters.com/india/2013/07/12/interview-with-bjp-leader-narendra-modi/>.
- Iyer-Mitra, Abhijit. “Modi-Xi Summit: Can India Celebrate ‘Success’ at Wuhan, Cautiously?.” *Business Standard*, 3 Mei 2018, [https://www.business-standard.com/article/economy-policy/modi-xi-summit-can-india-celebrate-success-at-wuhan-cautiously-118050300133\\_1.html](https://www.business-standard.com/article/economy-policy/modi-xi-summit-can-india-celebrate-success-at-wuhan-cautiously-118050300133_1.html).
- Jennings, Ralph. “Why It Hurts Less Now As China Punishes South Korea With Tourism Cuts.” *Forbes*, 2 Maret 2018, <https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2018/03/04/china-keeps-punishing-south-korea-with-tourism-cuts-for-now/#12ccf177366c>.
- Johnson, Abin. “China woos Bhutan \$ 10 Billion Aid Offer,” *Defpost*, 25 Agustus 2017, <https://defpost.com/china-woos-bhutan-10-billion-aid-offer/>.
- Lewis, Mark. “Norway’s salmon Rot as China Takes Revenge for Dissident’s Nobel Prize.” *Independent*, 6 Oktober 2011, <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/norways-salmon-rot-as-china-takes-revenge-for-dissidents-nobel-prize-2366167.html>.
- Lo, Kinling. “Did Nepal Snub India for China with Military Drill Decision, or is it Just a Nation in Flux?.” *South China Morning Post*, 16 September 2018, <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2164376/did-nepal-snub-india-china-military-drill-decision-or-it-just>.
- Misha, Pankaj. “Narendra Modi: the Divise Manipulator Who Charmed the World.” *The Guardian*, 9 November 2015,

<https://www.theguardian.com/world/2015/nov/09/narendra-modi-the-divisive-manipulator-who-charmed-the-world>.

Mohan, Archis. "BJP Legislator Tak Lesson at School run by Communist Party of China." *Business Standard*, 15 November 2014, [https://www.business-standard.com/article/politics/bjp-legislators-take-lessons-at-school-run-by-communist-party-of-china-114111501563\\_1.html](https://www.business-standard.com/article/politics/bjp-legislators-take-lessons-at-school-run-by-communist-party-of-china-114111501563_1.html).

Pandey, A. (2017). *The Doklam Standoff Seen Through Cartoons*.

Peri, Dinakar. "India's Media Silence on Doklam hal Worked, Says Navy Chief." *The Hindu*, 29 Agustus 2017, <https://www.thehindu.com/news/national/indian-medias-silence-on-doklam-has-worked-says-navy-chief/article19580018.ece>.

Sajjad, Baqir Syed. "China to Build Four Submarines in Karachi." *Dawn*, 7 Oktober 2015, <http://www.dawn.com/news/1211363>.

Sharma, Gopal. "Nepal Says China to Allow Acces to Ports, Ending Indian monopoly on Transit." *UK Reuters*, 7 September 2018, <https://uk.reuters.com/article/uk-china-nepal-ports/nepal-says-china-to-allow-access-to-ports-ending-indian-monopoly-on-transit-idUKKCN1LN1JE>.

Subedi, Mahendra. "Nepal, Cina Come Closer With Protocols on Transit and Transport." *CGTN*, 10 April 2019, <https://news.cgtn.com/news/3d3d674d79677a4d34457a6333566d54/index.html>.

Tiezzi, Shannon. "Why China Embraces Narendra Modi." *The Diplomat*, 29 Mei 2014, <https://thediplomat.com/2014/05/why-china-embraces-narendra-modi/>.

V, Som.. "Defence Minister Manohar Parrikar's Nuclear Remark Stressed As 'Personal Opinion.'" *NDTV*, 10 November 2016. <http://www.ndtv.com/india-news/defenceminister-manohar-parrikars-nuclear-remark-stressed-as-personal-opinion-1623952>.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Bamasutary, Junu. "Negotiation over Chumbi Valley in Sino-Bhutan Relations: Strategic Implications for India." tesis master, Sikkim University, 2016.



Kai, Boh Ze “One Belt, One Road, One Singapore.” *Mantraya*, diakses 1 Juli 2019, <http://mantraya.org/one-belt-one-road-one-singapore/>.

Menon, Prakash. “Doklam-India’s Silence is a Strategic Blunder,” *Indian National Interest*, diakses pada 8 Oktober 2018, <https://nationalinterest.in/doklam-indias-silence-is-a-strategic-blunder-3c172516ae98>.

Nichols, Sue. “China New Silk Road Offers Environmental Promise.” *Research @MSU*, diakses pada 7 Agustus 2019, <https://research.msu.edu/yesterdays-silk-road-tomorrows-environmental-superhighway/>.

Shanthie Mariet D’Souza, “Narendra Modi: Prime Minister of India,” *Encyclopedia Britannica*, Update Terakhir, 17 Juni 2019, <https://www.britannica.com/biography/Narendra-Modi>.

Palit, Amitendu. “The Maritime Silk Road Initiative (MSRI): Why India is Worried, What China Can Do.” *Global Policy*, 31 Mei 2017, <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/31/05/2017/maritime-silk-road-initiative-msri-why-india-worried-what-china-can-do>.

### **Publikasi Departemen atau Lembaga Pemerintah**

Embassy of India. *Press Release-Anti-Dumping-Duties on Imports From China*, 22 Agustus 2017. <http://www.eoibeijing.gov.in/anti-dumping.php>.

Election Commission of India. *General Election to Lok Sabha Trends & Result 2019*. <http://results.eci.gov.in/pc/en/partywise/index.htm>.

Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce. *Anti-dumping Cases in India Product and Profiles*. [http://commerce.gov.in/writereaddata/traderemedies/productprofile/cases\\_1.pdf](http://commerce.gov.in/writereaddata/traderemedies/productprofile/cases_1.pdf).

Ministry of External Affairs. *India-China Bilateral Relations*, [https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/China\\_October\\_2017.pdf](https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/China_October_2017.pdf).

Ministry of Foreign Affairs, PRC. “*The Facts and China’s Position Concerning the Indian Border Troops’ Crossing of the China-India Boundary in the Sikkim Sector into the Chinese Territory*.” 2 Agustus 2017. [http://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/P020170802542676636134.pdf](http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/P020170802542676636134.pdf).

National Informatic Centre. *An Overview of India's Economic Performance in 2017-18*. [http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/001-027\\_Chapter\\_01\\_Economic\\_Survey\\_2017-18.pdf](http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/001-027_Chapter_01_Economic_Survey_2017-18.pdf). Diakses 3 April 2019.

PMIndia. *Personal Life Story*. diakses pada 8 Juli 2019. [https://www.pmindia.gov.in/en/personal\\_life\\_story/personal-life-story](https://www.pmindia.gov.in/en/personal_life_story/personal-life-story)  
PMIndia, *Personal Life Story*, diakses pada 8 Juli 2019, [https://www.pmindia.gov.in/en/personal\\_life\\_story/personal-life-story/.y/](https://www.pmindia.gov.in/en/personal_life_story/personal-life-story/.y/).

### **E-Mail dan Pesan Teks Lain**

India-Bhutan Friendship Treaty 2007, article 2.

Rahul Gandhi (@RahulGandhi). "Why is Our Prime Minister Silent on China?." Twitter, 7 Juli 2017, pukul 2.11, <https://twitter.com/rahulgandhi/status/883251997884899328?lang=en>.